

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAAN PERKEBUNAN

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Jl. Manikam No. 29 A Telp. (0328) 668422
Fax. 671183 SUMENEP

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb;

Sebagai implementasi mekanisme perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyusun Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (REVISI RENSTRA-OPD) Tahun 2016 – 2021.

RENSTRA-OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019. Penyusun RENSTRA – OPD ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat pertanian dan pihak lain yang terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan jangka waktu 5 tahun ke depan Tahun 2016 – 2021 di Kabupaten Sumenep.

Disamping itu RENSTRA-OPD Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 disajikan untuk dijadikan bahan oleh pihak-pihak lain yang terkait dan berwenang dalam pembahasan dan penetapan alokasi kegiatan dan anggaran dalam penyusunan Program Kerja Tahunan (RENJA) OPD mendatang.

Atas tersusunnya RENSTRA-OPD ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah memberi masukan, bantuan pemikiran dan dukungan sehingga RENSTRA-OPD ini dapat diselesaikan.

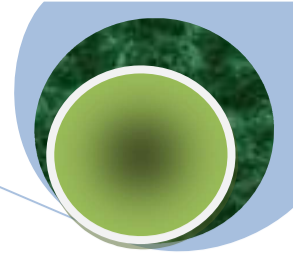
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, April 2018
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Sumenep

(Ir. BAMBANG HARIYANTO, M.Si)
Pembina Utama Muda
NIP. 19601018 199103 1 003

DAFTAR ISI

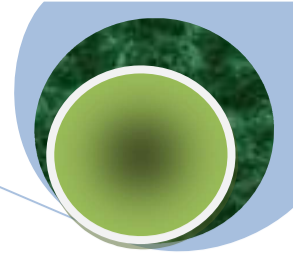
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistimetika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	46
3.1. Identifikasi Permasalahan dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan ...	46
3.2. Telaah Visi dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	49
3.3. Telaah Restra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	53
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	60
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP	73
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	61
Tabel 6.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	73





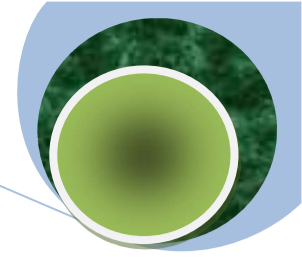
DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep..... 25



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian dalam arti luas yang mandiri dan berkelanjutan.


Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya konsep pembangunan pertanian tersebut diatas antara lain, Kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

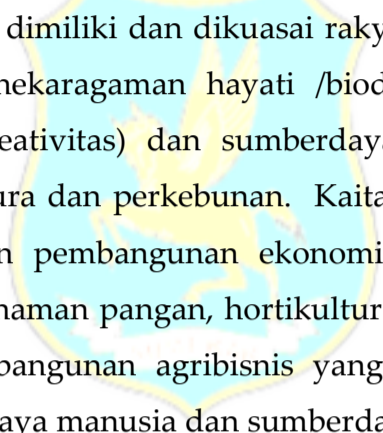
Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertujuan untuk : (1) meningkatkan kesejahteraan petani (2) meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tersebut, maka kegiatan pembangunan harus dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi berbasis kerakyatan, yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat. Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari rakyat diartikan bahwa dalam menghasilkan nilai tambah pembangunan harus menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh rakyat, mengandung pengertian bahwa dalam penciptaan nilai tambah pembangunan



(pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) harus langsung dilakukan oleh rakyat banyak, baik secara individu, berkelompok maupun organisasi ekonomi masyarakat dipedesaan. Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk rakyat berarti bahwa nilai tambah pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan harus langsung dapat dinikmati oleh rakyat banyak. Dengan demikian, apabila basis pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dilaksanakan secara konsisten, pola pembangunan kerakyatan demikian, akan dapat mencapai pertumbuhan, sekaligus pemerataan pendapatan yang signifikan.



Sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai rakyat banyak, meliputi sumberdaya alam (lahan, air dan keanekaragaman hayati /biodiversity). Sumberdaya manusia (tenaga, waktu, pikiran/kreativitas) dan sumberdaya teknologi dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kaitannya dengan hal tersebut, maka strategi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang memiliki kaidah pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari, oleh dan untuk rakyat adalah pembangunan agribisnis yang berbasis pada pendayagunaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi.

Sub – sektor pertanian tanaman pangan memiliki peranan penting dan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, memberikan andil cukup besar pada PDB (Produk Domestik Bruto), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian daerah, wilayah dan nasional.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi, sub - sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diakui telah mampu memperlihatkan ketangguhannya, dengan pertumbuhan yang positif, sementara sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan negatif. Sub-sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup besar.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tidak disertai dengan pengembangan industri hulu dan industri hilir pertanian serta jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan ; tidak mampu untuk mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif (bersaing). Selain itu besarnya produksi komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan disatu wilayah, belum tentu memiliki kemampuan bersaing di pasar lokal dan internasional, karena nilai tambah dan pemanfaatan keunggulan komparatif masih relatif rendah; sehingga tidak mampu



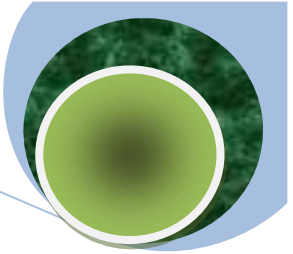
meningkatkan pendapatan petani dan pendapatan masyarakat.

Tantangan internal pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang patut menjadi perhatian kedepan, adalah terjadinya stagnasi pertumbuhan produktivitas, penurunan kapasitas lahan akibat terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan komoditi pertanian lainnya serta ke non-pertanian, seperti perumahan, kawasan industri, fasilitas umum dan lain-lain, terutama yang berlangsung pasti disekeliling dan disekitar perkotaan yang cenderung meningkat. Selain itu pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke depan, dihadapkan pada tantangan penurunan insentif usaha tani dan persaingan yang kurang fair dengan produk import yang semakin kuat sejalan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas serta perubahan lingkungan strategis lainnya; yang secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reorientasi kebijakan dan revitalisasi program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dalam rangka peningkatan sebesar-besar peran masyarakat dalam pembangunan; dan pemerintah dalam hal ini berperan sebagai fasilitasi peningkatan peran masyarakat tersebut. Dengan demikian kedepan pembangunan pertanian tidak lagi berorientasi kepada penyediaan paket-paket program, namun lebih dititik beratkan kepada upaya pemberdayaan petani; sehingga inisiatif dan kreasi untuk menggerakkan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diharapkan timbul dan berkembang dari masyarakat petani sendiri.

Upaya pemberdayaan masyarakat (petani) dimaksudkan agar masyarakat petani sebagai pelaku utama pembangunan mampu menentukan arah pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (*people centered development*), memiliki kemampuan merespon perubahan pasar, berorientasi kepentingan jangka panjang, melakukan inovasi teknologi yang terus menerus berkembang dan menggunakan teknologi ramah lingkungan serta mengupayakan pelestarian sumberdaya alam; yang kesemuanya dicapai dan diwujudkan melalui revitalisasi penyuluhan pertanian, penguatan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Beberapa kondisi tersebut menuntut strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Sumenep dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016-2021** yang selanjutnya memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yaitu : keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan peran masyarakat dan pemantapan arah perubahan struktur sosial,



ekonomi, budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang penyusunannya memperhatikan perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta


Renstra SKPD disusun berdasarkan dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan cerminan dari Visi dan Misi Bupati terpilih. Selanjutnya Renstra SKPD akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang disusun sebagai masukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hasil sinkronisasi program pembangunan dari Pemerintah Pusat dan hasil Musrenbang yang merupakan prioritas program cerminan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian agar seluruh rencana kegiatan yang terhimpun dalam RENJA-SKPD dapat dioperasionalkan dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, disusunlah Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD mengacu pada RAPBD yang akan dibahas bersama lembaga legislatif (DPRD) dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penulisan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 
- 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan




Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
19. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 28. Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
 29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dirumuskannya Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) ini adalah sebagai upaya untuk merumuskan lebih rinci tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. yang disusun atas dasar visi dan misi Bupati terpilih dalam suatu bentuk Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya pelayanan pada masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sumenep sesuai visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman pada pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan tahun 2016 – 2021.
2. Mengoptimalkan hasil pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan pada bagian pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sesuai indikator yang ditetapkan.
4. Sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Sumenep.



1.4 SITEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS (RESTR) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2021

Sistimatika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang secara keseluruhan memuat :



SISTIMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

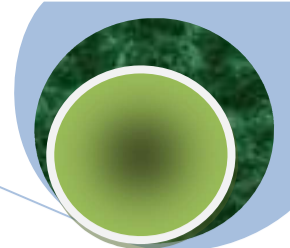
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

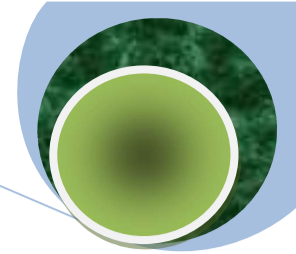
- 3.1. Identifikasi Permasalahan dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Restra Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN





BAB II

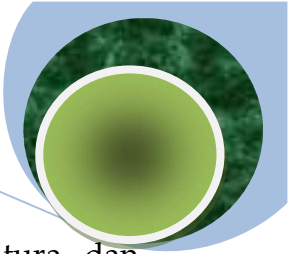
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, Bab II pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan”.

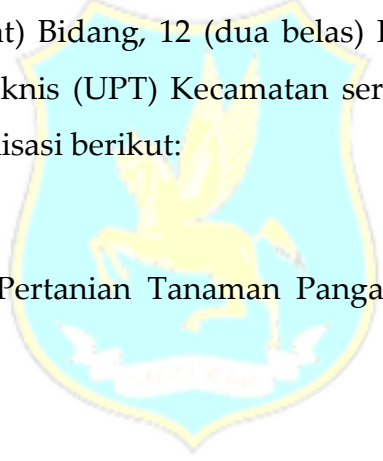
Penjabaran tugas dan fungsi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 pada Bab III pasal 4 diuraikan sebagai berikut :

- a. perumusan perencanaan dan pelaksanaan program, pembinaan umum dan teknis operasional serta pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, pembinaan umum dan teknis operasional serta pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. pengembangan prasarana pertanian;
- e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
- f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- i. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- k. pelaksanaan pengamatan dan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- l. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sarana prasarana serta pengembangan usaha dan permodalan;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan usaha penyelamatan produksi hasil pertanian

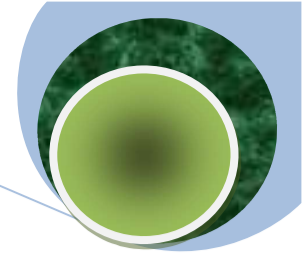
- 
- tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi, dan 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kecamatan serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- 
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Program dan Perencanaan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,, membawahi :
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - Seksi Produksi Hortikultura;
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan.
 - d. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 - Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 - Seksi Penyuluhan
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :
 - Seksi Bimbingan Usaha;
 - Seksi Pengolahan;
 - Seksi Pemasaran
 - f. Bidang Perkebunan
 - Seksi Produksi Tanaman Tahunan;
 - Seksi Produksi Tanaman Semusim;

- Seksi Perbenihan dan Perlindungan
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Penjabaran lebih rinci tentang Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan dan keuangan

b. Fungsi

- penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

a.2. Sub Bagian Program dan Perencanaan

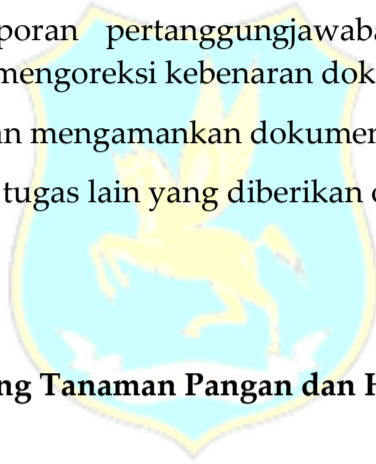
- menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;



- menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

a.3. Sub Bagian Keuangan

- menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;



b. Tugas dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas

Melaksanakan urusan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

b. Fungsi

- penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan penyediaan, pemanfaatan benih dan bibit tanaman serta pembinaan penangkar dan pedagang benih dan bibit tanaman;
- penyusunan rencana sasaran luas, produktivitas dan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- pelaksanaan pembinaan terhadap rekomendasi paket teknologi anjuran spesifik lokasi dan pelaksanaan model/pola pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi dan mutu produksi;

- pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan dan standarisasi teknis perlindungan tanaman dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan serta analisa dampak kerugian gangguan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- pelaksanaan identifikasi potensi dan perencanaan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- pelaksanaan pembinaan pengelolaan data tanaman pangan dan hortikultura;
- pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.1. Seksi Produksi Tanaman Pangan

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan
- melaksanakan bimbingan teknis, rencana sasaran luas, peningkatan produksi Produksi Tanaman Pangan melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi;
- menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi, model/pola pengembangan produksi, rencana perluasan areal tanam padi dan palawija;
- menyiapkan bahan pemantauan dan laporan peningkatan mutu produksi tanaman;
- mengumpulkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, pengendalian serangan dan analisa dampak kerugian gangguan organisme pengganggu tanaman pangan;
- melaksanakan pengelolaan data Padi dan Palawija;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

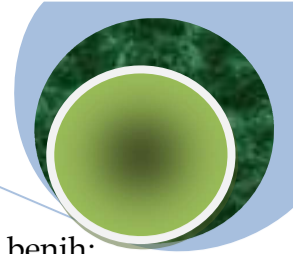


b.2. Seksi Produksi Hortikultura

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi hortikultura;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang di bidang hortikultura;
- melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- melaksanakan bimbingan teknis, rencana sasaran luas, peningkatan produksi hortikultura melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi;
- menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi, model/pola pengembangan produksi, rencana perluasan areal tanam hortikultura;
- menyiapkan bahan pemantauan dan laporan peningkatan mutu produksi tanaman hortikultura;
- mengumpulkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, pengendalian serangan dan analisa dampak kerugian gangguan organisme pengganggu tanaman hortikultura;
- melaksanakan pengelolaan data Hortikultura;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b.3. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang



beredar;

- menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- menyiapkan bahan pengamatan OPT;
- menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- melakukan pengelolaan data OPT;
- melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

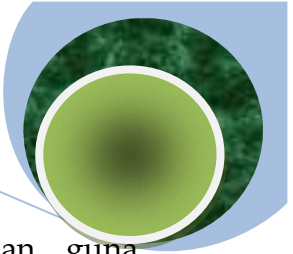
c. Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

a. Tugas

Melaksanakan urusan lahan, irigasi dan pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan.

b. Fungsi

- penyediaan dukungan infrastruktur pertanian dan perkebunan;
- pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian dan perkebunan;
- pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian dan perkebunan;
- pelaksanaan ketetapan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air, dan sarana produksi serta penyuluhan;
- pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan lahan dan air, dan sarana produksi serta penyuluhan;
- pelaksanaan perumusan program pengembangan di bidang pengelolaan



lahan dan air, dan sarana produksi serta penyuluhan;

- pelaksanaan pengkajian metodologi dan sistem penyuluhan guna meningkatkan sumber daya manusia penyuluh dan petani serta bimbingan teknis dinamika kelompok tani dalam rangka peningkatan kompetensi kelembagaan petani;
- penyiapan bahan penyelenggaraan penyuluhan, sistem penyuluhan, pengadaan dan penyebaran sarana penyuluhan pertanian serta bimbingan teknis, pengujian dan penerapan teknologi spesifik lokasi;
- penyusunan bahan pengembangan kemitraan usaha dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kelembagaan petani;
- perumusan pemanfaatan air irigasi, pengembangan sumber air dan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta rehabilitasi pengelolaan lahan pertanian;
- pelaksanaan pembinaan, pengembangan rancang bangun prototype, modifikasi alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan bidang pengelolaan lahan dan air, dan sarana produksi serta penyuluhan;
- pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

c.1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan irigasi pertanian dan pembiayaan;
- melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air serta kelembagaan petani pemakai air atau P3A;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air;
- melaksanakan pengelolaan data Lahan Irigasi dan Pembiayaan;
- melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi



Lahan Irigasi dan Pembiayaan; dan


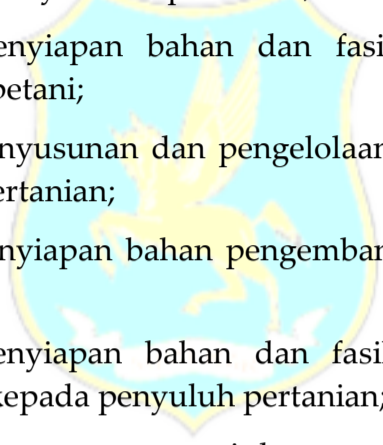
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ;

c.2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis dan merk alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melaksanakan pembinaan rancang bangun, modifikasi prototype, kualifikasi dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melaksanakan penyebarluasan informasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melaksanakan pengelolaan data Alat dan Mesin Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alsintan ; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

c.3. Seksi Penyuluhan

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- melaksanakan pelatihan teknis dan pertemuan-pertemuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pertanian serta menyusun program penyuluhan tingkat daerah, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan rencana kerja penyuluh;

- 
- 
- melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan penilaian angka kredit penyuluh serta menyusun pedoman penyelenggaraan penyuluhan, sistim penyuluhan dan pengadaan, penyebaran informasi penyuluhan pertanian;
 - melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi serta supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan serta hasil sistim kerja laku penyuluh;
 - melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - melakukan penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan Penyuluhan dan Pembiayaan Sarana Pertanian;
 - melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

d. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran

a. Tugas

Melaksanakan urusan bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran.

b. Fungsi

- pelaksanaan identifikasi potensi dan perencanaan pengembangan usaha pertanian, kelembagaan usaha dan jasa serta sistim agribisnis;
- pelaksanaan pembinaan pengelolaan data promosi pengolahan dan



pemasaran hasil usaha dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar;

- pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan dan perkreditan dalam rangka pengembangan permodalan;
- pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis;
- penyediaan dukungan bimbingan penyusunan rencana kebutuhan bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran;
- penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

d.1. Seksi Bimbingan Usaha

- melaksanakan pengelolaan dan kerjasama usaha;
- melakukan bimbingan dan pelatihan teknis terhadap pengembangan usaha pertanian dan perkebunan;
- melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan;
- melaksanakan identifikasi potensi, perencanaan dan pengembangan permodalan usaha.
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan usaha hasil di bidang pertanian dan perkebunan;
- menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi bimbingan usaha; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

d.2. Seksi Pengolahan

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan;
- melaksanakan pengelolaan dan kerjasama pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- melaksanakan analisis rekayasa teknologi pertanian dan perkebunan untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- melakukan inventarisasi, identifikasi dan aplikasi terhadap rekayasa teknologi pertanian dan perkebunan untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;



- melakukan bimbingan dan pelatihan teknis terhadap pengusaha pengolah hasil pertanian dan perkebunan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil di bidang pertanian dan perkebunan;
- menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

d.3. Seksi Pemasaran

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pemasaran;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemasaran;
- melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang pertanian dan perkebunan;
- memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis;
- melaksanakan pengembangan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil di bidang pertanian dan perkebunan;
- menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemasaran; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

e. Tugas dan Fungsi Bidang Perkebunan

a. Tugas

Melaksanakan urusan produksi tanaman tahunan, produksi tanaman semusim serta perbenihan dan perlindungan.

b. Fungsi

- penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perkebunan;
- penyusunan Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- pemberian bimbingan teknis budidaya di bidang perkebunan;



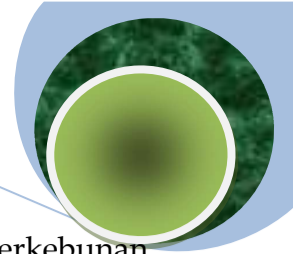
- penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan penyediaan, pemanfaatan benih dan bibit tanaman serta pembinaan penangkar dan pedagang benih dan bibit tanaman;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembenihan, produksi tanaman perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

e.1. Seksi Produksi Tanaman Tahunan

- menyusun program kerja pelaksanaan tugas produksi tanaman perkebunan tahunan;
- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Produksi Tanaman Tahunan;
- menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan tahunan;
- melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan tahunan;
- melaksanakan pemberian bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan tahunan;
- melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan lahan perkebunan dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan;
- melaksanakan penyebaran bibit dan sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan;
- melaksanakan pengelolaan data produksi tanaman perkebunan tahunan;
- menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

e.2. Seksi Produksi Tanaman Semusim

- menyusun program kerja pelaksanaan tugas produksi tanaman perkebunan semusim;
- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Produksi Tanaman Semusim;
- menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan semusim;
- melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan semusim;
- melaksanakan pemberian bimbingan teknis budidaya tanaman



perkebunan semusim;

- melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan lahan perkebunan dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan semusim;
- melaksanakan penyebaran bibit dan sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan semusim;
- melaksanakan pengelolaan data produksi tanaman perkebunan semusim;
- menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

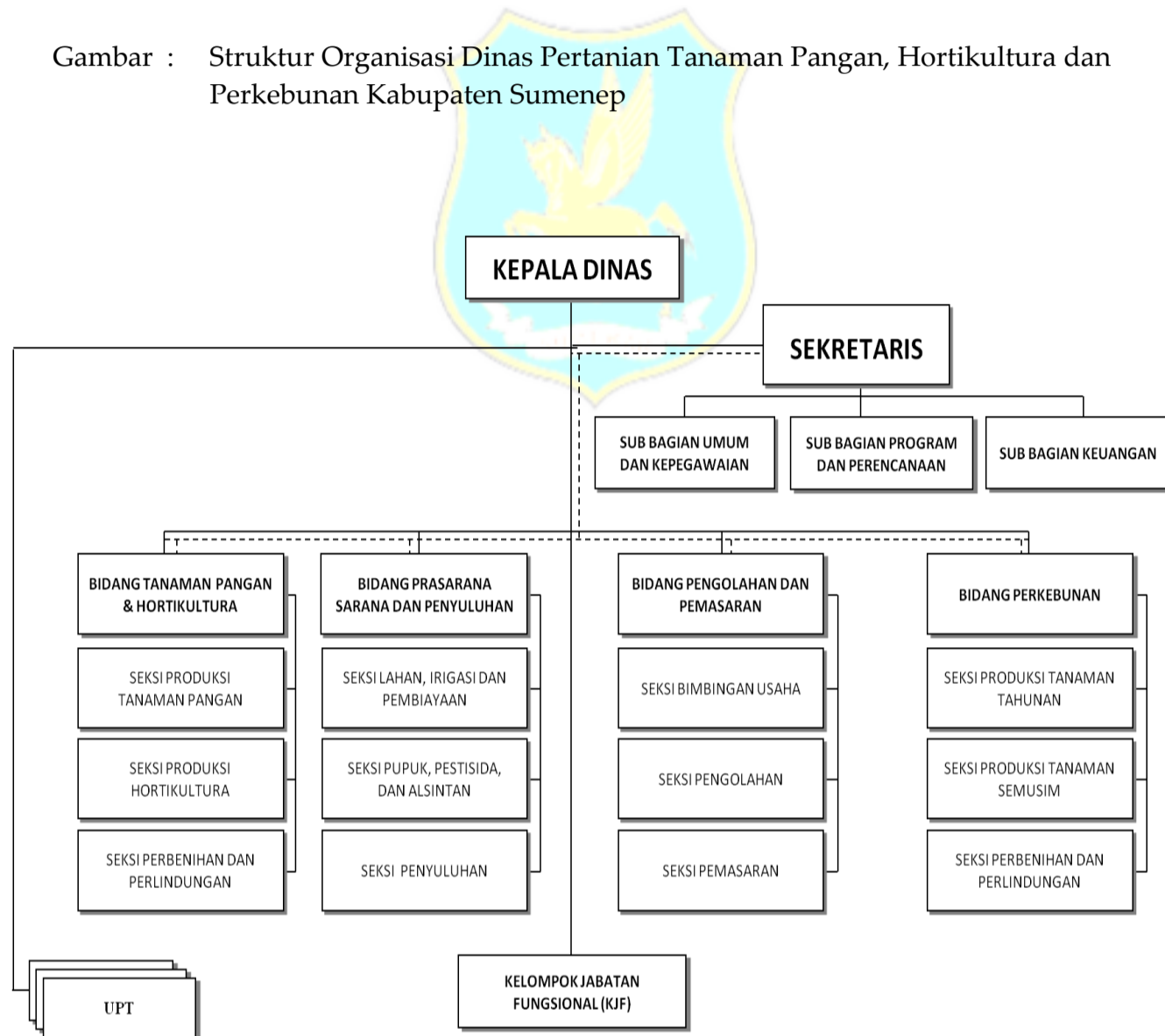
e.3. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- menyusun program kerja pelaksanaan tugas Perbenihan dan Perlindungan;
- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- menyediakan dan melakukan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
- melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap penangkar benih dan bibit tanaman perkebunan, blok-blok penghasil tinggi tanaman perkebunan (tanaman tahunan dan tanaman semusim) sebagai sumber benih unggul;
- menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- menyiapkan bahan pengamatan OPT;
- menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- melakukan pengelolaan data OPT;
- menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan

perlindungan di bidang perkebunan;

- melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang perkebunan;
- menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Gambar : Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan pertanian, hortikultura dan perkebunan memiliki posisi kunci, karena potensi sumberdaya manusia dan alam sebagai asset utama pembangunan berada dalam sektor tersebut. Namun demikian, potensi tersebut belum optimal, disebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia pertanian terdiri : aparat pemerintah termasuk petugas lapangan (penyuluh, dan pengamat organisme pengganggu tumbuhan) serta pelaku usaha pertanian.

Jumlah aparat pertanian keseluruhan adalah orang, yang terbagi dalam pejabat struktural orang, non struktural/staf orang dan aparat fungsional 59 orang (terinci dalam fungsional penyuluh pertanian 46 orang dan fungsional pengamat hama dan penyakit tanaman pangan 13 orang). Jumlah aparat yang bertugas pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep adalah orang dan yang bertugas di lapangan adalah 147 orang (PPL dan PHP) serta THLTB-PP sebanyak 88 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya 46 orang PNS dan 88 orang Tenaga Harian tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTB PP).

Berdasarkan pendidikannya Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep menunjukkan hal sebagai berikut :

Tabel

Pendidikan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sarjana S2	20	
2.	Sarjana S1	61	
3.	D4	7	
4.	Ahli Madya/ D3	8	
5.	SPMA / SMA	30	
6.	SMP	-	
7.	Dalam Pendidikan D4	-	
8.	D1	1	
	Jumlah	126	

Dari tabel di atas tampak bahwa pegawai dengan pendidikan S1 menduduki proporsi terbesar. Patut dipuji bahwa semangat pegawai pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tinggi untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, walaupun dengan biaya sendiri. Tampaknya hal ini selain karena tersedianya sarana pendidikan yang memadai, seperti Universitas WR Supratman Surabaya, Universitas Wiraraja dan lainnya; juga adanya kemudahan ijin belajar yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep.

2.2.1.1 Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 48 (Empat puluh delapan) pegawai pertanian melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. Seorang Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. Seorang Sekretaris dengan eselon III-A
3. Empat orang Kepala Bidang (Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prasarana Sarana Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, Perkebunan) dengan eselon III-B
4. Tiga orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Program dan Perencanaan dan Subbag Keuangan,) dengan eselon IV-A
5. Dua belas orang Kepala Seksi (Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Produksi Hortikultura, Perbenihan dan Perlindungan, Lahan Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida, dan Alsintan, Penyuluhan, Bimbingan Usaha, Pengolahan, Pemasaran, Produksi Tanaman Tahunan, Produksi Tanaman Semusim dan Perbenihan dan Perlindungan) dengan eselon IV-A
6. 27 (dua puluh tujuh) orang Kepala UPT dengan eselon IV-A


Sudah barang tentu pengisian pejabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya).

2.2.1.2 Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang dan kebutuhan. Dalam kelompok jabatan fungsional terdapat pejabat fungsional yang mempunyai keahlian tertentu.

Pada bidang pertanian, secara ideal seharusnya terdapat pejabat fungsional dengan keahlian-keahlian Agronomi, Sosial-Ekonomi Pertanian, Tanah dan Pemupukan, Hortikultura, Hama dan Penyakit Tanaman, yang diperlukan untuk menunjang dan mendukung (*back stopper*) kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan yang langsung berhubungan bertatap muka dengan petani. Namun sampai dengan saat ini, keahlian-keahlian terhadap bidang keilmuan tersebut belum dapat diwujudkan, karena standar, sertifikasi dan pedoman pelaksanaannya masih belum ada dan belum jelas/ pasti; sehingga klasifikasi yang ada hanyalah Penyuluh Ahli dan Penyuluh Terampil.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai pejabat fungsional, mempunyai tugas membina kelompok binaan untuk beberapa desa, sehingga dalam satu wilayah kecamatan dimungkinkan terdapat lebih dari seorang penyuluh. Secara normative seorang PPL membina 16 (enam belas) kelompok tani, dengan tugas pokok (1) menyampaikan informasi dan mengajarkan teknologi pertanian kepada petani, (2) membantu memecahkan masalah atau kendala yang dihadapi petani, dan (3) membantu petani dalam mengusahakan dan mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani untuk usahanya.



Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep tahun 2015 tercatat sebanyak 46 orang dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) sebanyak 88 orang.

Satu hal yang khusus pada jabatan fungsional penyuluh pertanian adalah kepangkatannya yang didasarkan kepada angka kredit yang dikumpulkan penyuluh atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kenaikan pangkat didasarkan pada pengumpulan angka kredit, sebenarnya menjadi peluang bagi pejabat fungsional penyuluh untuk mencapai pangkat setinggi-tingginya, dengan jalan mengumpulkan angka kredit yang sebanyak-banyaknya; namun demikian tidak seluruh pejabat fungsional mampu memanfaatkan peluang tersebut.

Di samping jabatan fungsional penyuluh pertanian, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, terdapat Jabatan Fungsional Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman Pangan (PHP) yang mempunyai tugas dan fungsi (1) melakukan pengamatan, analisis dan peramalan perkembangan hama dan penyakit tanaman pangan, (2) memberikan rekomendasi dan anjuran teknologi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan dan (3) bersama-sama PPL menggerakkan kelompok tani dan anggotanya dalam usaha pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan. Status kepegawaian PHP adalah PNS pusat diperbantukan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, secara keseluruhan berjumlah 13 orang.


2.2.1.3 Kelembagaan Petani

Kelompok tani sebagai wadah kelembagaan petani merupakan organisasi petani yang anggotanya mempunyai kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, dalam suasana keakraban dan keserasian serta memiliki kehendak yang sama untuk melakukan peningkatan taraf hidupnya melalui usaha di bidang pertanian.

Proses registrasi kelompok tani dimulai dari usulan Kepala Desa yang memang banyak mengetahui tentang keberadaan kelompok tani di desanya, direkomendasi oleh Camat dan diajukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep. Selanjutnya dinas membentuk tim verifikasi untuk melakukan pengecekan dan menilai tentang keberadaan serta kegiatan kelompok tani.

Kriteria verifikasi meliputi waktu pendiriannya, kelengkapan pengurus, jumlah anggota, luas hamparan usaha tani keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sarana dan prasarana yang dipunyai, permodalan dan administrasi kelompoknya. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, kelompok tani yang bersangkutan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka kelompok tani tersebut ditetapkan sebagai kelompok tani, dan sebagai bukti pengakuannya diterbitkan sertifikat registrasi kelompok tani oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Sumenep.

Di samping itu, telah tumbuh dan berkembang pula kelompok-kelompok wanita tani atau KWT, sebagai wujud kesadaran wanita di pedesaan untuk membantu keluarganya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya. Kelompok wanita tani yang tumbuh dan berkembang mencapai 826



kelompok, yang merupakan potensi untuk dikembangkan kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan di bidang pertanian.

Perbedaan prinsip antara kelompok tani dan KWT terletak pada hamparan areal usaha tani yang dikelolanya, yaitu jika kelompok tani hamparan usaha taninya adalah pada lahan sawah dan tegal, maka KWT yang menjadi hamparan usaha tani utamanya adalah pekarangan dan atau atas dasar domisili anggotanya.

Memang patut diakui bahwa cikal bakal dari terbentuknya KWT pada awalnya berasal dari kumpulan-kumpulan pengajian wanita yang banyak tumbuh dan berkembang di pedesaan, yang karena kemauan dan kesadarannya, selanjutnya menambah kegiatan usahanya di bidang pertanian.

Selain itu juga berkembang kelompok tani yang basis kepentingan dan usahanya didasarkan kepada pengelola air irigasi, dalam wadah Himpunan Petani Pemakai Air atau HIPPA; yang keseluruhan jumlahnya mencapai 77 kelompok.



2.2.2 Sumber Daya Alam Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Sebagai Wilayah Kabupaten berkepulauan di Jawa Timur Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura, terletak diantara 113° 32' 54" – 116° 16' 48" Bujur Timur dan diantara 4° 55' - 7° 24' lintang selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Laut Jawa /Selat Flores, sebelah selatan Selat Jawa dan di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Pamekasan.

Secara geografis wilayah kabupaten Sumenep dengan luas terbagi dalam 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah Sumenep daratan dengan luas 1.146,93 km² atau 54,79%; dan wilayah Sumenep Kepulauan dengan luas 946,53 km² atau 45,21 % meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Secara administratif Kabupaten Sumenep terbagi atas 27 Kecamatan (sembilan Kecamatan Kepulauan dan 18 Kecamatan Daratan), 328 Desa dan 4 (empat) wilayah kelurahan.

Kabupaten Sumenep beriklim kering, yang menurut *Oldemann* termasuk dalam type iklim D3, mempunyai rata-rata curah hujan 1.707 milimeter per bulan, dengan jumlah dari hujan 200 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan curah hujan terendah pada bulan Agustus. Bulan basah terjadi selama 4 (empat) bulan, yaitu mulai bulan Nopember sampai dengan

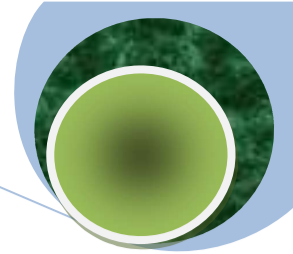
bulan Pebruari dan bulan kering 6 (enam) bulan terjadi dari bulan April sampai dengan bulan September.

Jumlah sungai yang mengalir sepanjang tahun ada 3 (tiga) buah, yaitu Kali Saroka, Kali Patrean dan Kali Bakul, sedang yang mengalir pada musim hujan saja sebanyak 10 (sepuluh) buah. Keadaan ini memberikan gambaran kabupaten Sumenep yang kering dan gersang serta berpengaruh terhadap pola penggunaan lahannya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumenep

No.	Jenis Penggunaan	Luas (hektar)
I.	Lahan Sawah	
1	Irigasi	8.690,12
2	Tadah Hujan	16.991,4
3	Rawa Pasang Surut	-
4	Rawa Lebak	-
	Jumah Lahan Sawah	25.681,96
II.	Lahan Pertanian Bukan Sawah	
1	Tegal/Kebun	117.341
2	Ladang/Huma	-
3	Sementara Tdk Diusahakan	-
5	Lainnya	-
	Jumah Lahan Pertanian Bukan Sawah	117.341

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 dijelaskan bahwa potensi pertanian di Kabupaten Sumenep menurut RTRW Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033 meliputi pertanian lahan irigasi, pertanian lahan non irigasi, dan hortikultura dengan total luas 114.062 hektar sawah dan seluas 20.860,20 hektar dengan rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi teknis dengan luas kurang lebih 8.287,2 hektar dari luas lahan di Kabupaten Sumenep dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten



Sumenep ditetapkan dengan luas kurang lebih 12.573 hektar.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2009, penggunaan lahan di Kabupaten Sumenep, mengalami perubahan : yaitu naiknya lahan sawah 0,32% (646 hektar) dan turunnya lahan tegal 5,79%: berarti bahwa dengan pembangunan irigasi terjadi peningkatan lahan sawah yang cukup berarti.

Jenis tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh kompleks Mediteran Merah, Litosol dan Grumosol, merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan lihat pada horizon bawah, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat menembang dan mengerut (sifat *vertik*): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak, utamanya dengan perlakuan pemupukan. Tabel 6 berikut menyajikan jenis tanah dan penyebarannya di kabupaten Sumenep.

Tabel 2.2

Jenis Tanah dan Wilayah Penyebarannya di Kabupaten Sumenep

No.	Jenis Tanah	Wilayah Penyebaran
1.	Alluvial Kelabu Kekuningan	Sumenep, Ambunten
2.	Komplek Mediteran Merah dan Latosol	Kalianget, Talango, Batuputih, Dasuk, Pasongsongan, Gading, Guluk-Guluk, Lenteng, Gapura, Dungkek, Pragaan, Bluto, Giligenting dan Saronggi
3.	Asosiasi Litosol dan Mediteran Coklat Kemerahan	Talango, Ganding, Guluk-Guluk dan Lenteng
4.	Komplek Mediteran Merah	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk dan Lenteng
5.	Grumosol	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk, Lenteng, Batang-Batang dan Pragaan
6.	Regosol	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk, Lenteng dan Pragaan

7.	Litosol	Manding, Rubaru, Guluk-Guluk, Lenteng, Pragaan dan Batang-Batang
8.	Grumosol Kelabu	Guluk-Guluk dan Lenteng
9.	Alluvial Kelabu Kemerahan	Ganding, Guluk-Guluk dan Pragaan
10.	Aluvial Hidromorf	Giligenting dan Pragaan

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.

Tabel 2.3
Topografi Kabupaten Sumenep

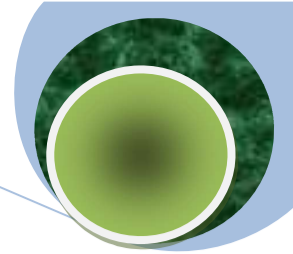
No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%	
A.	Ketinggian Tempat	1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
		2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
		3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
		B.	Ketinggian Tempat	1. Datar	0° – 2°
2. Landai	2° – 15°	125.908		63	
3. Miring	> 15°	21.984		11	

2.2.3 Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2.2.3.1 Sarana Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana organisasi meliputi seluruh aset yang digunakan untuk melaksanakan dan melancarkan tugas-tugas organisasi baik dalam memberikan pelayanan, pelaksanaan pembangunan pertanian maupun pembinaan kepada masyarakat tani dan pembinaan aparat pertanian sendiri.

Sarana dan prasarana organisasi dapat berupa barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan; maupun barang bergerak seperti sarana mobilitas (mobil dan sepeda motor), alat peraga (elektronik dan non elektronik), sarana perkantoran dan lainnya. Secara berturut-turut akan disajikan pada uraian



berikut :

a. Bangunan

Bangunan dapat berupa kantor, rumah dinas, gudang dan lain sebagainya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Bangunan yang dikuasai Dinas Pertanian Tanaman Pangan

No	Nama Bangunan	Lokasi / Alamat	Ukuran (m ²)	Tahun Pembu- tan
1.	Kantor Dinas	Jl. Manikam No. 29A	956	1982
2.	Gudang Dinas	Giring	288	2006
3.	Kantor BPP Induk Manding	Giring	120	2006
4.	Rumah Jaga BPP Induk Manding	Giring	80	2006
5.	Lantai Jemur BPP Induk Manding	Giring	600	2006
6.	Kantor BPP Induk Gapura	Batudinding	204,5	2006
7.	Rumah Jaga BPP Induk Gapura	Batudinding	80	2006
8.	Kantor BPP Induk Ambunten	Ambunten Timur	192,5	2006
9.	Rumah Jaga BPP Induk Ambunten	Ambunten Timur	80	2006
10.	Kantor BPP Induk Bluto	Bluto	192,5	2006
11.	Kantor BPP Pasongsongan	Pasongsongan	192,5	2007
12.	Kantor BPP Guluk-guluk	Guluk-guluk	307,5	2015
13.	Kantor BPP Rubaru	Rubaru	413	2016
14.	Kantor BPP Induk Ganding	Ketawang Karay	180	1982
15.	Kantor BPP Induk Arjasa	Laok Jangjang Arjasa	197	1982
16.	Kantor KB Dewi Sri	Bilis-Bilis Arjasa	86,75	1982
17.	Gudang KB Dewi Sri	Bilis-Bilis Arjasa	310	1982
18.	Rumah Ka KB Dewi Sri	Bilis-Bilis Arjasa	113,3	1982
19.	Lantai Jemur KB Dewi Sri	Bilis-Bilis Arjasa	460	1982

Keberadaan bangunan kantor BPP Induk merupakan bangunan eks BPP/BIPP/Cabang Dinas yang umurnya sudah mencapai lebih dari 50 tahun dan beberapa telah direhab pada tahun 2008, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa bangunan, dalam keadaan rusak ringan sampai dengan rusak berat. Dinas telah berupaya untuk mengusulkan perbaikan dan renovasi terhadap bangunan-bangunan dimaksud.



b. Tanah

Tanah yang dikuasai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri dari tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor / gedung milik dinas, dan tanah yang dimanfaatkan untuk percontohan teknologi maupun sebagai kebun perbanyakan benih / bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.5
Sebaran Tanah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

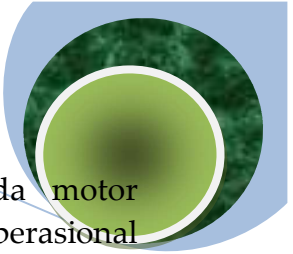
No	Uraian	Lokasi	Luas (m2)	Pemanfaatan
1.	Tanah Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Bangselok Sumenep	1.608	Bangunan Kantor Dinas
2.	Kebun Dinas Bluto	Bumbungan	18.685	Kantor
3.	Kebun Dinas Giring	Giring	13.130	Gudang
4.	Kebun Dinas Gapura	Batudinding	11.470	Kantor
5.	Kebun Dinas Ganding	Ktw. Karay	8.050	Kantor
6.	Kebun Dinas Longos	Longos	27.500	Percontohan
7.	Kebun Dinas Ambunten	Ambunten Timur	12.016	Kantor
8.	Kebun Dinas Padandangan	Padandangan	31.070	Percontohan
9.	Kebun Dinas Laok Jangjang	Laok Jangjang	1.700	Percontohan
10.	Kebun Dinas Dewi Sri	Bilis-Bilis	7.400	Kebun benih
11.	Kebun Dinas Perkebunan	Daramista,	10.000	1982
12.	Kebun Dinas Perkebunan	Ketawang Daleman	10.000	2012
13.	Kebun Dinas Perkebunan	Sindir	10.000	2010
14.	Kebun Dinas Perkebunan	Rubaru	10.000	1982
15.	Kebun Dinas Perkebunan	Dungkek	10.000	1982

Sebenarnya masih ada satu kebun dinas lainnya, yaitu Kebun Dinas Banasareh – Rubaru eks lahan PPTK (Pusat Percontohan Tanah Kering) yang seharusnya dikuasai Dinas; namun karena ada gugatan dari pihak warga sekitar, maka tanah kebun dinas tersebut masih dalam sengketa yang belum ada penyelesaiannya.

c. Sarana Mobilitas

Kendaraan roda 4 (empat) yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep berjumlah 6 (enam) buah, yaitu sebuah kendaraan jabatan Kepala Dinas (Toyota Kijang Innova GM/T 2 Tahun 2013 M-46-VP), (Toyota Kijang LGX 1,8 2004 Station Wagon M-1041-VP) dan 2 (dua) buah kendaraan dinas operasional (Toyota Kijang station wagon 1995 M-304-VP, Carry 1996 M-318-VP, Carry 1996 M-321-VP dan Toyota Pick Up TGN 10 R M-8058-VP, Isuzu Phanter 1996 M-385-VP).

Kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 8 buah dan Kendaraan roda



2 (dua) keseluruhan berjumlah 159 buah, terdiri dari sepeda motor operasional penyuluh pertanian 90 buah dan sepeda motor operasional pejabat struktural dan non struktural berjumlah 69 buah.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tidak semua petugas pertanian (khususnya pegawai non struktural dan penyuluh) memegang kendaraan dinas roda 2 (dua).

d. Sarana Perkantoran

Sarana perkantoran terdiri dari Meubelair, Alat Peraga, Alat Komunikasi, Alat Pengolah Data, dan lainnya. Meubelair yang ada terdiri dari meja, kursi, lemari arsip, lemari buku, rak besi, filing kabinet dan lainnya. Alat peraga terdiri dari televisi, video recorder, OHP, screen, handy camera, photo tustel, sound system (baik di kantor dinas maupun di cabang dinas), papan tulis, papan data dan buku-buku pustaka.

Alat komunikasi yang dimiliki Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan antara lain telepon (PABX dan facsimile) 4 (empat) nomor, yaitu 668422, 665311, 671183 dan 672236, dan di masing-masing BPP Induk. Selain itu memasuki era teknologi informasi, dinas mempunyai situs [Website:www.sumenep.go.id/diperta.sumenep.go.id](http://www.sumenep.go.id/diperta.sumenep.go.id).

Alat pengolah data yang ada adalah perangkat Komputer (CPU, monitor, printer dan scanner) yang keseluruhannya berjumlah 62 unit; di samping itu dinas memiliki pula, mesin ketik, mesin hitung kalkulator dan lainnya.

2.2.3.2 Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Didasarkan kepada potensi pertanian yang ada, secara ideal di Kabupaten Sumenep seharusnya jumlah sarana pertanian berturut-turut adalah sebagai berikut : *Hand Tractor* 6.793 unit, *Power Thresher* 3.539 unit, pompa air 5.660 unit, *Hand Sprayer* 7.704 unit, Emposan Tikus 10.000 unit, dan *Rice Milling Unit* 379 unit.

Sarana pertanian dapat berbentuk alat dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi pertanian, selain ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, juga dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha tani, sehingga keuntungan dan pendapatan usaha tani meningkat. Didasarkan kepada potensi pertanian yang ada, secara ideal di Kabupaten Sumenep masih belum mencukupi kebutuhan, tetapi karena keterbatasan dana, pengetahuan dan ketrampilan petani, pada kenyataannya jumlah sarana pertanian yang ada masih jauh dari jumlah yang diharapkan, sebagaimana

tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Keragaan Sarana Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Jenis Sarana	Jumlah (unit)		
		Ideal	Yang Ada	Berfungsi
1.	<i>Hand Tractor</i>	6.793	556	300
2.	<i>Pompa Air</i>	5.660	316	257
3.	<i>Hand Sprayer</i>	7.704	190	180
4.	<i>Emposan Tikus</i>	10.000	152	144
5.	<i>Power Thresher</i>	3.539	61	27
6.	<i>Rice Milling Unit</i>	379	390	390

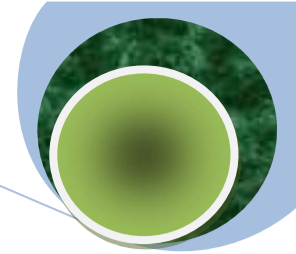
Hanya RMU saja yang telah melebihi kapasitas yang ada, tetapi walaupun demikian jenis RMU yang ada sudah dibawah standart kualitas yang dianjurkan, sedangkan sarana lainnya masih jauh dari yang diharapkan.

Prasarana pertanian di Kabupaten Sumenep terdiri dari bangunan-bangunan Embung Air, Check Dam, Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani Pertanian Kebun Benih / Percontohan dan laboratorium pertanian; yang berfungsi untuk pertanian dalam proses produksi pertanian serta memperlancar aktivitas usaha tani dan ekonomi masyarakat petani. Tabel berikut menyajikan keragaan prasarana pertanian di Kabupaten Sumenep.

Tabel 2.6

Keragaan Prasarana Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Embung	21	Unit
2.	Jaringan Irigasi	19	Unit
3.	Jalan Usaha Tani	47	Unit
4.	Kebun Benih	1	61,22 Ha
5.	Kebun Hortikultura	1	27,5 Ha
6.	Kebun Dinas	8	140,34 Ha



Tabel 2.7
Luas Pemilikan Lahan Rumah Tangga Tani

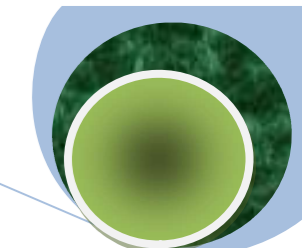
No	Uraian	ST 1993	ST 2003	Kenaikan (Penurunan)
A.	Jumlah KK tani yang berkecimpung pada pertanian tanaman pangan	259.786	217.577	(42.209)
B.	Rerata Pemilikan Lahan			
	Kurang dari 0,25 hektar	116.904	101.224	(15.680)
	0,26 – 0,50 hektar	70.142	77.454	7.312
	0,51 – 0,75 hektar	33.772	36.592	2.820
	0,76 – 1,00 hektar	10.391	14.676	4.285
	1,01 – 2,00 hektar	18.185	13.059	(5.126)
	Lebih dari 2,00 hektar	10.392	3.519	(6.873)

Dalam hal pengetahuan dan keterampilan petani dalam usaha tani, secara rerata masih tergolong rendah sampai sedang, di samping itu lebih diperburuk lagi dengan kenyataan bahwa generasi muda petani mempunyai kecenderungan kurang tertarik dan kurang berminat untuk berkecimpung dalam usaha di bidang pertanian.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, bagian Keempat belas pasal 214 disebutkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas “Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Kewenangan dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan”. Sedangkan pasal 231 disebutkan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kehutanan dan perkebunan. Dengan demikian, mengacu pada Perbup tersebut dinyatakan bahwa pada periode sebelumnya kinerja pelayanan masih terpisah menjadi 2 (dua) SKPD, yaitu : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Adapun capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan kinerja dan realisasi anggaran yang berupa sasaran target Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep periode sebelumnya (tahun 2010 -2015), khususnya berkenaan dengan Pelayanan dan kewenangan Dinas dapat disampaikan lebih jelasnya sebagai Tabel berikut :



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
Kabupaten Sumenep

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.630.000	6.630.000	7.332.000	7.332.000		4.314.000	6.461.000	7.300.500	7.328.000		65,07%	97,45%	99,57%	99,95%	3,53%	90,51%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		124.436.000	167.400.000	155.400.000	188.520.000		97.341.301	142.738.449	141.774.222	181.813.821		78,23%	85,27%	91,23%	96,44%	16,22%	87,79%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			15.700.000	9.900.000	2.400.000			7.606.500	6.176.800	2.369.000			48,45%	62,39%	98,71%	-56,35%	69,85%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		7.209.000	7.209.000	8.100.000	51.900.000		6.313.975	6.929.000	7.976.100	51.642.400		87,58%	96,12%	98,47%	99,50%	184,37%	95,42%
Penyediaan Alat Tulis Kantor		19.116.019	19.116.029	22.159.983	22.202.000		19.107.000	19.115.500	22.112.000	22.175.500		99,95%	100,00%	99,78%	99,88%	5,37%	99,90%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		16.273.900	16.273.900	20.200.000	19.972.200		14.236.050	16.221.900	20.174.500	19.932.350		87,48%	99,68%	99,87%	99,80%	7,67%	96,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11.940.000	11.940.000	13.540.000	13.540.000		9.776.900	11.940.000	13.540.000	13.540.000		81,88%	100,00%	100,00%	100,00%	4,47%	95,47%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		9.940.000	26.780.000	38.500.000	32.020.000		9.896.000	24.178.000	38.494.500	31.916.000		99,56%	90,28%	99,99%	99,68%	65,45%	97,38%
Penyediaan Makanan dan Minuman		16.880.000	16.880.000	21.810.000	21.810.000		16.548.500	16.802.100	21.794.000	21.551.500		98,04%	99,54%	99,93%	98,81%	9,74%	99,08%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		85.639.650	94.203.615	141.800.000	147.310.000		84.251.500	94.201.700	141.560.350	147.309.583		98,38%	100,00%	99,83%	100,00%	21,47%	99,55%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		9.646.000	10.610.000	13.000.000	13.000.000		9.610.000	10.600.000	12.875.000	12.892.050		99,63%	99,91%	99,04%	99,17%	10,84%	99,44%
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran				43.800.000					43.680.000					99,73%	-		99,73%
Operasional UPTD Pertanian			27.540.000	31.212.000	31.212.000			26.865.000	23.112.000	31.009.500			97,55%	74,05%	99,35%	6,67%	90,32%
Fasilitasi Pelaksanaan Hari-Hari Khusus				43.930.000	43.930.000				43.810.000	43.489.500				99,73%	99,00%	0,00%	99,36%
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			243.610.000					243.610.000					100,00%			-	100,00%
Pembangunan Gedung Kantor		78.906.000					78.249.450					99,17%				-	99,17%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		66.300.000	95.000.000				64.975.000	91.699.000				98,00%	96,53%			-56,71%	97,26%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		61.286.000	202.600.000	61.260.800	17.360.000		58.231.000	195.370.750	60.300.000	15.610.000		95,02%	96,43%	98,43%	89,92%	29,72%	94,95%
Pengadaan Mebelair				59.150.000	12.050.000				58.250.000	11.988.000				98,48%	99,49%	-79,63%	98,98%
Pengadaan Komputer				40.530.000	24.030.000				38.000.000	22.400.000				93,76%	93,22%	-40,71%	93,49%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		80.855.000	48.665.000	60.287.500	42.000.000		79.327.500	48.640.000	57.875.000	41.885.000		98,11%	99,95%	96,00%	99,73%	-15,42%	98,45%
Pemeliharaan Berkala/Rutin Kendaraan Dinas/Operasional		56.610.000	68.021.517	60.121.517	47.800.000		52.368.220	67.966.150	59.992.700	47.795.500		92,51%	99,92%	99,79%	99,99%	-3,98%	98,05%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		10.000.000	8.000.000	8.000.000	11.000.000		5.430.000	7.960.000	8.000.000	11.000.000		54,30%	99,50%	100,00%	100,00%	5,83%	88,45%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		1.500.000	2.100.000	2.095.000	2.100.000		71,43%	100,00%	99,76%	100,00%	0,00%	92,80%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	10.996.000	11.000.000	11.000.000		100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			100.000.000	220.400.000	170.400.000			98.888.900	219.510.000	169.496.000			98,89%	99,60%	99,47%	48,86%	99,32%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			128.800.000					127.477.500					98,97%			-	98,97%
Pendidikan dan Pelatihan Formal		30.000.000	10.000.000	10.000.000	4.500.000		30.000.000	9.435.000	10.000.000	4.500.000		100,00%	94,35%	100,00%	100,00%	-40,56%	98,59%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		28.482.000	28.383.000	26.060.000	23.660.000		28.008.050	28.326.900	25.988.200	23.635.200		98,34%	99,80%	99,72%	99,90%	-5,91%	99,44%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		28.328.198	26.617.500	22.240.000	16.790.000		25.702.500	25.175.350	22.227.000	16.777.000		90,73%	94,58%	99,94%	99,92%	-15,66%	96,29%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		37.947.000	32.950.000	29.655.000	21.955.000		33.207.550	32.792.850	28.902.000	21.854.500		87,51%	99,52%	97,46%	99,54%	-16,38%	96,01%
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani			85.000.000					83.550.000					98,29%			-	98,29%
Pemantapan Kelembagaan dan Pemberdayaan KTNA		35.825.000		57.000.000			28.781.000		54.468.000			80,34%		95,56%		-100,00%	87,95%
Peningkatan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan				48.939.200					43.784.400					89,47%		-	89,47%
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		125.000.000	123.160.000	116.392.500	54.502.500		122.648.000	122.646.950	116.184.000	53.901.500		98,12%	99,58%	99,82%	98,90%	-20,05%	99,10%
Pengembangan Desa Mandiri Pangan		85.000.000	137.227.800				81.126.750	135.058.000				95,44%	98,42%			-38,56%	96,93%
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija		100.000.000	34.340.000	79.449.000	28.477.000		89.519.950	29.017.500	72.859.000	11.836.000		89,52%	84,50%	91,71%	41,56%	0,51%	76,82%
Pengembangan Diversifikasi Tanaman		101.250.000	81.133.000	92.673.000	22.015.000		86.003.300	77.200.500	87.926.700	12.760.000		84,94%	95,15%	94,88%	57,96%	-27,30%	83,23%
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering		106.945.000	104.528.771	248.765.000	36.302.000		93.207.000	85.045.000	237.363.750	13.999.750		87,15%	81,36%	95,42%	38,56%	16,77%	75,62%
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan		257.900.000	44.940.000	104.550.000	32.755.500		178.248.250	41.124.200	90.408.300	26.051.900		69,12%	91,51%	86,47%	79,53%	-6,20%	81,66%
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya			110.975.500	137.150.000	46.787.000			110.975.000	136.378.900	45.766.710			100,00%	99,44%	97,82%	-21,15%	99,09%
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan					69.697.350					69.695.550					100,00%		100,00%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian			437.054.000				414.438.500					94,83%					
Operasional Identifikasi dan Perumusan Program dan Kegiatan	40.535.000	305.430.000	14.600.000	14.600.000		40.372.800	304.420.850	14.353.500	14.577.500			99,60%	99,67%	98,31%	99,85%	186,09%	99,36%
Pengembangan Hortikultura Tanaman Semusim	103.750.000	59.877.000	60.927.000	18.421.500		96.881.000	59.876.900	49.957.500	18.195.000			93,38%	100,00%	82,00%	98,77%	-36,77%	93,54%
Administrasi Prasarana dan Sarana Pertanian		164.330.000					163.365.900						99,41%				99,41%
Administrasi Kegiatan Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan		3.589.000					3.581.000						99,78%				99,78%
Optimalisasi Ketahanan Pangan			90.000.000	32.588.000				89.075.500	32.312.900					98,97%	99,16%	-63,79%	99,06%
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian			1.044.600.000	600.000.000				1.040.149.000	596.839.000					99,57%	99,47%	-42,56%	99,52%
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan		194.210.000	93.692.500	47.362.500			186.859.089	93.023.250	47.259.500				96,21%	99,29%	99,78%	-50,60%	98,43%
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan			172.200.000	30.530.000				170.216.050	29.659.400					98,85%	97,15%	-82,27%	98,00%
Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan			2.577.000	9.525.000				2.577.000	9.371.000					100,00%	98,38%	269,62%	99,19%
Perencanaan dan Monitoring Prasarana dan Sarana Pertanian			71.000.000	51.597.000				70.800.000	51.354.000					99,72%	99,53%		99,62%
Administrasi Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (WISMP)		150.985.000					126.470.000						83,76%				83,76%
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Loan WISMP-2)			67.260.000	155.607.000				65.360.000	142.388.950					97,18%	91,51%	131,35%	94,34%
Fasilitasi dan Monitoring Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif			25.000.000	45.611.000				25.000.000	44.550.500					100,00%	97,67%	82,44%	98,84%
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan				20.795.000					20.785.000						99,95%		99,95%
Pengembangan Pangan Lokal				29.304.000					29.261.750						99,86%		99,86%
Optimalisasi Perluasan Cetak Lahan Sawah Baru		80.600.000					20.200.000						25,06%				25,06%
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	808.029.000					802.485.000						99,31%					99,31%
Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	175.000.000					163.789.000						93,59%					93,59%
Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Buah	107.780.000					101.557.400						94,23%					94,23%
Administrasi Prasarana dan Sarana Pertanian	100.000.000					96.446.000						96,45%					96,45%
Administrasi Kegiatan Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	1.450.000					168.000						11,59%					11,59%
Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif	63.000.000					63.000.000						100,00%					100,00%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	413.357.000		349.400.000	197.209.950	407.668.900		333.677.500	194.806.998		98,62%		95,50%	98,78%	-71,78%	97,64%
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	45.000.000				43.407.000					96,46%					96,46%
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	158.642.000	47.900.000	91.791.000	30.483.000	157.599.000	47.805.000	90.309.000	30.405.200		99,34%	99,80%	98,39%	99,74%	-14,99%	99,32%
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	25.000.000	137.054.000			24.930.800	112.058.400				99,72%	81,76%			348,22%	90,74%
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan			148.007.000	106.778.000			147.820.600	106.628.750				99,87%	99,86%	-27,86%	99,87%
Monitoring dan Pengawasan Pupuk/Pestisida	50.000.000	97.060.000	100.322.000	25.081.000	46.472.500	96.133.500	100.272.000	24.805.692		92,95%	99,05%	99,95%	98,90%	7,49%	97,71%
Pengawasan Pupuk Bersubsidi			162.800.000				148.700.000					91,34%			91,34%
Pemberdayaan HIPPA dan GHIPPA		39.320.000	25.000.000			39.267.000	24.825.000				99,87%	99,30%		-136,42%	99,58%
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	50.000.000	154.007.000			49.916.000	153.176.750				99,83%	99,46%			108,01%	99,65%
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan	778.614.000				773.611.750					99,36%					99,36%
Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)			7.070.697.000	8.280.680.000			7.049.121.000	8.209.395.000				99,69%	99,14%	17,11%	99,42%
Monitoring Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian			125.685.000	100.000.000			124.961.600	99.308.200				99,42%	99,31%	-20,44%	99,37%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian				14.863.000.000				14.803.609.000					99,60%		99,60%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	377.323.000	278.398.000	381.226.000	139.755.000	372.244.150	276.233.941	379.089.000	131.486.954		98,65%	99,22%	99,44%	94,08%	-17,54%	97,85%
Pengembangan Agribisnis Sistem Cooperative Farming	29.798.500				29.218.500					98,05%					98,05%
Gelar Produk Aneka Pangan Olahan	60.009.000	44.302.700	60.699.000	68.294.000	58.780.000	44.270.700	59.523.000	67.449.864		97,95%	99,93%	98,06%	98,76%	7,78%	98,68%
Pameran Potensi Produk Pertanian	130.672.500	115.660.000	285.640.000	55.583.700	125.674.500	115.623.400	247.745.000	55.270.000		96,18%	99,97%	86,73%	99,44%	18,31%	95,58%
Prima Tani Sumenep	25.000.000				24.666.500					98,67%					98,67%
Penanganan Pasca Panen Jagung Sistem Resi Gudang	25.000.000	59.998.500	53.250.000	52.630.000	24.898.500	59.456.250	52.575.000	50.786.000		99,59%	99,10%	98,73%	96,50%	42,53%	98,48%
Bimbingan Pengoperasian dan Penanganan Alat Pasca Panen Secara Berkala	42.802.000				41.512.000					96,99%					96,99%
Pengembangan Kawasan Agropolitan	94.532.500	29.941.000	23.850.000	23.850.000	93.402.200	27.772.500	23.735.000	23.170.000		98,80%	92,76%	99,52%	97,15%	-29,56%	97,06%
Revitalisasi Statistik Pertanian	75.000.000	55.875.000			71.169.000	55.873.200				94,89%	100,00%			-125,50%	97,44%
Analisis Usahatani dan Pasar Hasil Pertanian			15.000.000	15.000.000			14.350.000	14.900.000				95,67%	99,33%	0,00%	97,50%

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2011-2015

Adanya isu strategis terkait dengan perubahan lingkungan strategis di era globalisasi, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian semakin meningkat. Sementara disisi lain, justru semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi antara lain makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, serta pesatnya perubahan kemajuan teknologi dan informasi global. Capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2011-2015 terukur dari indikator kinerja, begitu juga pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

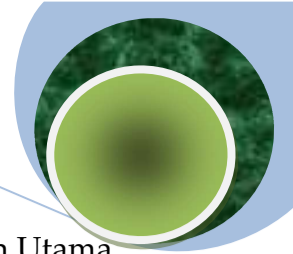
❖ Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2011-2015

2.3.1.1. Sasaran Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan utama local

Pengukuran Kinerja Urusan Pertanian yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Kualitas Produk Tanaman Pangan, sebagaimana tabel berikut:

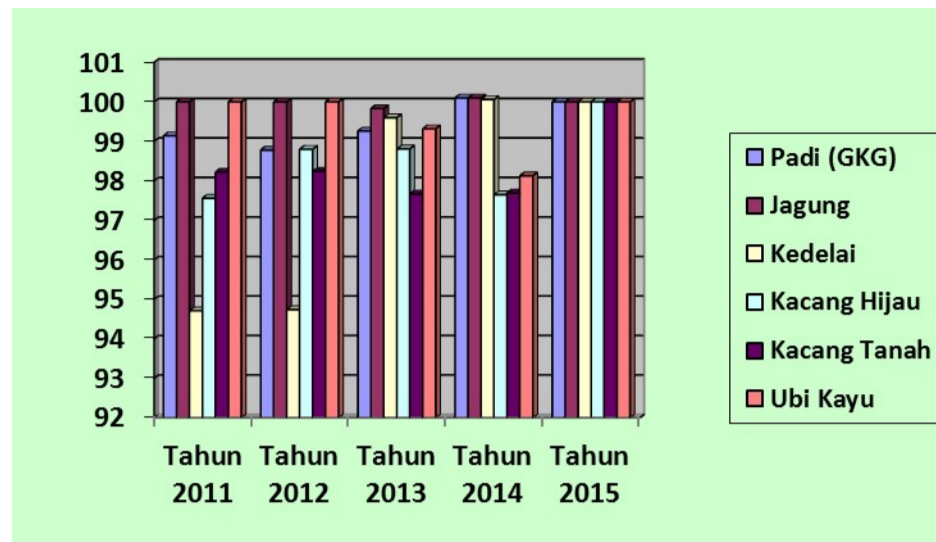
Tabel 2.7

No.	Indikator kinerja	Satuan	% Capaian Th.2011	% Capaian Th.2012	% Capaian Th.2013	Tahun 2014			Tahun 2015			Capaian Th.2015 dibandingkan Capaian Th.2014
						Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :											
-	Padi (GKG)	%	99,14	98,78	99,26	6,15	6,156	100,10	6,16	6,16	100,00	99,9
-	Jagung	%	100	100	99,83	3,102	3,105	100,10	3,105	3,105	100,00	99,9
-	Kedelai	%	94,71	94,74	99,60	1,719	1,72	100,06	1,72	1,72	100,00	99,4
-	Kacang Hijau	Ton/Ha	97,56	98,79	98,1	1,7	1,66	97,65	1,71	1,71	100,00	102,4
-	Kacang Tanah	Ton/Ha	98,22	98,24	97,67	1,73	1,69	97,69	1,75	1,75	100,00	102,4
-	Ubi Kayu	Ton/Ha	100	100	99,32	15	14,72	98,13	15,20	15,20	100,00	101,9



Grafik

Indikator Kinerja Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar



Padi (GKG)

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian realisasi dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 mengalami kenaikan, dari Tahun 2011 sebesar 6,06 ton/ha menjadi 6,16 ton/ha di Tahun 2015.

Jagung

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian realisasi dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 mengalami kenaikan, dari Tahun 2011 sebesar 3,08 ton/ha menjadi 3,105 ton/ha di Tahun 2015.

Kedelai

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian realisasi dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 mengalami kenaikan, dari Tahun 2011 sebesar 1,712 ton/ha menjadi 1,72 ton/ha di Tahun 2015.

Kacang Hijau

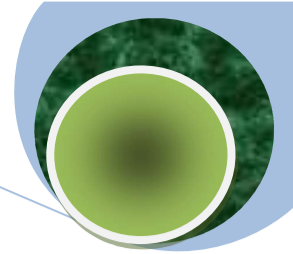
Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Namun demikian, apabila dibandingkan kondisi capaian realisasi dari Tahun 2011 mengalami kenaikan, dari Tahun 2011 sebesar 1,64 ton/ha menjadi 1,66 ton/ha di Tahun 2014 dan menjadi 1,71

ton/ha tahun 2015 walaupun bila dibandingkan dari target di RPJMD realisasi Tahun 2015.

Kacang Tanah

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Namun demikian, apabila dibandingkan kondisi capaian realisasi dari Tahun 2011 mengalami kenaikan, dari Tahun 2011 sebesar 1,66 ton/ha menjadi 1,69 ton/ha di Tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 1,75 ton/ha telah mencapai target di RPJMD sebesar 1,73 ton/ha.





Ubi Kayu

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Namun demikian, apabila dibandingkan kondisi capaian realisasi dari Tahun 2011 mengalami kenaikan, dari Tahun 2011 sebesar 14,50 ton/ha menjadi 14,72 ton/ha di Tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 15,20 ton/ha melebihi dari target di RPJMD sebesar 15 ton/ha.

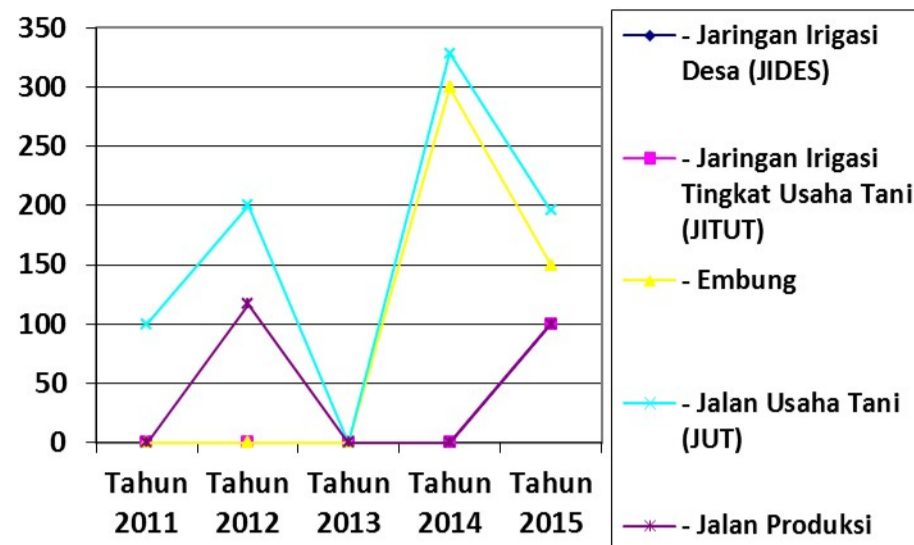
Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun terutama komoditas padi yang bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan antara lain : 1) pemberdayaan petani/kelompok melalui berbagai sekolah lapang, pembinaan/pelatihan; 2) fasilitasi sarana/prasarana on farm dan off farm. Dengan berbagai fasilitasi pemerintah, petani diharap akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (benih, tanah, air dan sarana produksi lainnya serta sarana panen maupun pasca panen) secara terpadu yang kinerjanya.

2.3.1.2. Sasaran Peningkatan Fasilitas Infrastruktur Pertanian

No.	Indikator kinerja	Satuan	% Capaian Th.2011	% Capaian Th.2012	% Capaian Th.2013	Tahun 2014			Tahun 2015			Capaian Th.2015 dibandingkan Capaian Th.2014
						Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
1.	Peningkatan fasilitas infrastruktur pertanian											
	- Jaringan Irigasi desa (IIDES)	Unit	0	0	0,00	4	0	0,00	21	21	100,00	100,00
	- Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	Unit	0	0	0,00	3	0	0,00	19	19	100,00	100,00
	- Embung	Unit	0	0	0,00	5	15	300,00	14	21	150,00	50,00
	- Jalan Usaha Tani (JUT)	Unit	100	200	0,00	7	23	328,57	24	47	195,83	59,60
	- Jalan Produksi	Unit	0	117	0,00	7	0	0,00	32	32	100,00	100,00

Grafik

Indikator Kinerja Peningkatan Fasilitas Infrastruktur Pertanian



Peningkatan fasilitas infrastruktur pertanian

Jaringan Irigasi desa (JIDES)

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013 ada kenaikan (100%).

Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (JITUT)

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013 ada kenaikan (100%).

Embung

Pada Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013 tidak ada realisasi, tetapi pada Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 150,00%.

Jalan Usaha Tani (JUT)

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 195,83%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja Tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan sedangkan pada Tahun 2013 tidak ada realisasi capaian kinerja (0%).

Jalan Produksi

Pada Tahun 2011, 2013 dan Tahun 2014 tidak ada realisasi, tetapi pada Tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

❖ Capaian Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011-2015

2.3.1.3. Sasaran Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2011 - 2015


Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, maka dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja dengan cara mengukur pencapaian sasaran sebagai berikut :

Perkembangan Produksi Perkebunan Tahun 2011 - 2015

Uraian	Produksi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase Perkembangan Produksi Perkebunan, Komoditas :	4,11	12,09	15,58	16,57	12,21
a. kelapa (ton)	36.342,92	36.557,70	36.184,05	40.610,70	42.442,92
b. siwalan (ton)	629,90	624,17	664,27	706,82	744,37
c. cabe jamu (ton)	8.336,29	8.671,22	8.671,58	9.468,71	9.868,69
d. jambu mete (ton)	3.097,02	3.469,37	3.469,76	4.430,48	4.974,31
e. tembakau (ton)	9.246,88	13.471,42	3.229,67	9.429,74	9.244,92

2.3.1.4. Akutabilitas Keuangan SKPD Tahun 2011-2015


Adapun capain kinerja Keuangan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 Tahun 2006, bahwa Anggaran Pnedapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja serta Pembiayaan. Di Kabupaten Sumenep, kebijakan daerah selama ini diarahkan pada: (1). Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada; (2) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima



masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; (3). Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah. Perkembangan dan pertumbuhan relaisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep dari tahun 2010-2015 adalah sebesar 16,7% sebagaimana terlampir. Sedangkan dukungan APBD terhadap kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep selama tahun 2010-2015 bersifat fluktuatif sebesar 22,8% dan untuk realisasinya sebesar 26,9% dengan rincian sebagaimana tabel terlampir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, seperti : prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta progres pelaksanaan program selama tahun 2010 – 2015 berdasarkan Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja (Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011) yang mencakup aspek implementasi (prosentase penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, efisiensi), dan aspek manfaat. Selanjutnya dapat dirumuskan dari permasalahan pendanaan bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa pengadaan/kontrak, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2021 :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan awal RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Suemenp Tahun 2016-2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

- 
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

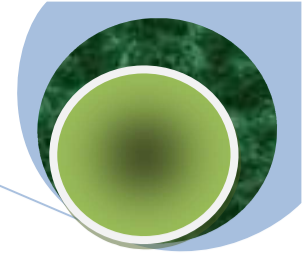
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam peningkatan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep kedepan dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus dihadapi terutama dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas serta Ketahanan Pangan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari kondisi luas lahan 25.681,96 ha yang terdiri dari lahan Irigasi seluas 8.690,12 ha dan Non Irigasi seluas 16.991,84 ha, maka sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2011-2031 ditetapkan Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan 20.860,20 ha hal ini dikarenakan adanya pengurangan lahan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, industrialisasi, serta pembangunan sarana dan prasarana termasuk pembangunan fasilitas umum. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, karena disatu sisi target produksi dan produktifitas harus ditingkatkan sementara luas arel tanam semakin berkurang.

Tantangan kedua adalah banyaknya tenaga penyuluh pertanian yang hampir memasuki batas usia pensiun sehingga sangat kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang ada di lapangan sementara formasi pengangkatan PNS untuk tenaga Penyuluh Pertanian sangat sedikit.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah struktur organisasi yang cukup jelas sehingga memudahkan dalam rangka koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan program-program kegiatan termasuk dalam rangka evaluasi pelaksanaan program. Kedua adalah kualitas jumlah Pegawai Dinas Pertanian yang sudah cukup baik hal ini bisa dilihat dari personel yang telah menempuh pendidikan S2 sebanyak 21 orang dan S1 sebanyak 61 orang hal ini akan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas pekerjaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pembangunan pertanian, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sumenep kedepan juga memiliki sejumlah peluang:

1. Pasar komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terbuka luas;
2. Peluang investasi di bidang agroindustry dan agribisnis cukup besar;
3. Tersedianya fasilitas permodalan dari Bank/lembaga Keuangan non Bank;
4. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen;
5. Terdepat kesenjangan antara produksi potensial dan aktual;
6. Dukungan teknologi informasi untuk promosi produk unggulan.

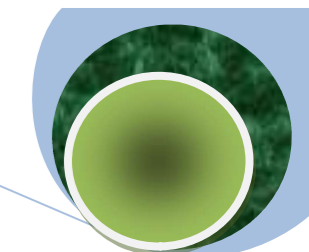


3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sumenep pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah periode 2011 - 2015. Permasalahan pokok adalah belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sebagai akibat dari:

1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian;
2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan; kaitannya dengan peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
3. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
4. Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi;
5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
6. Belum optimalnya kelembagaan petani;
7. Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani .

Berbagai permasalahan mendasar dan permasalahan pokok tersebut menjadi isu strategis pada periode mendatang, mengingat permasalahan tersebut diperkirakan masih akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu 2016 – 2021. Kedepannya, isu strategis harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan pertanian, hortikultura dan perkebunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pembangunan pertanian, hortikultura dan perkebunan.



Tabel
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep

NO	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
				Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	Gambaran pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rendahnya tingkat produksi, produktifitas dan kualitas produk tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	Restra Dinas Pertanian Tanaman Pangan pangan , hortikultura dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan teknis pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pertanian Pembinaan teknis tentang penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya laju pertumbuhan Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehilangan hasil yang cukup tinggi Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar, serta permodalan
2	Kajian Restra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	Berfluktuasinya tingkat produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura	Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan teknis pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pertanian Pembinaan teknis tentang penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar serta ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya laju pertumbuhan penduduk Persaingan Pasar Global 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor; Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani
3	Kajian Renstra Kementerian Pertanian	Terdapat perbedaan target luas tanam dan produksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan kebijakan belum secara optimal memperhatikan daya dukung dan pola pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih relatif rendahnya keterlibatan sektor lain dalam menetapkan angka produksi Perbedaan angka konsumsi perkapita 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan pada sektor perbenihan dan pengawasan tanaman Terbatasnya penerapan alsintan

NO	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
				Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
4	Kajian RTRW	Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan komoditas Pengembangan JITUT dan JIDES Optimasi Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Pemerintah Daerah terhadap LP2B 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Rendahnya pendapatan usaha tani Belum optimalnya infrastruktur pertanian Rendahnya pemanfaatan teknologi alsintan
5	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan pertanian/sawah	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya penerapan pupuk organik dan pestisida organik/hayati	Perubahan pola tanam dan seranga OPT pada tanam pangan dan hortikultura	Menurunnya daya dukung sumber daya alam, anomaly iklim dan degradasi lahan


3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang makin terdesentralisasi harus dapat disikapi dengan pembaharuan manajemen pemerintahan, terutama pada seluruh OPD di daerah. Perubahan pesat yang terjadi di masyarakat dalam berbagai dimensinya selalu menuntut aparatur pemerintahan agar selalu merespon setiap aspirasi dan perkembangan actual masyarakat. Kegagalan birokrasi pemerintahan untuk dapat mengerti dan memahami keinginan, keluhan dan tuntutan masyarakat hanya akan mengurangi legitimasi eksistensi pemerintahan yang ada, menciptakan ketidakpercayaan (*Distrust*), bahkan dapat mengancam pemegang kekuasaan atau amanah dari rakyat.

3.2.1 TELAAH VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 adalah Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional harus dapat dijabarkan oleh seluruh SKPD melalui program kegiatan dan Rencana Strategis masing-masing SKPD.

- a. Sumenep Semakin Sejahtera, Adalah merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai program kegiatan yang dapat menyentuh masyarakat banyak, untuk sektor pertanian salah satunya melalui penguatan modal masyarakat melalui seperti program PUAP. Program ini diharapkan dapat mampu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberian modal usaha bagi para gapoktan dan kelompok tani dalam mengembangkan usaha pertaniannya, termasuk dengan pembangunan Jaringan irigasi Desa dan jalan usaha tani akan dapat memperlancar transportasi pertanian serta meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Mandiri, memiliki tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada guna dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Untuk itu Dinas Pertanian telah dan akan melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para petani melalui program Program SLPTT dan SLPHT, SL Iklim dan program program pelatihan lainnya sehingga dapat menciptakan kemandirian dan ketahanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani.
- c. Agamis, mengandung pengertian bahwa semua proses dan out put pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi semata namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual, sehingga pemerintahan di Kabupaten Sumenep dapat tercipta masyarakat yang memiliki nilai moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- d. Transparan, memiliki pengertian bahwa pelaksanaan program pemerintahan harus sesuai dengan prinsip Good Governance, yaitu demokratis, Transparan, akuntabel. Untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mengambil langkah-langkah dalam setiap pelaksanaan program tentang transparansi baik dari segi




peruntukan kegiatan, sasaran kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan, sehingga masyarakat dan kelompok tani yang menjadi sasaran program kegiatan dapat mengetahui secara langsung.

- e. Bersih, memiliki pengertian bahwa aparaturnya dalam pelaksanaan program kegiatan tidak terlibat praktik korupsi. Untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan selalu ditekankan untuk tidak bermain-main dengan program dan diluar ketantuan yang ada sehingga tidak berdampak pada kualitas program dan kepercayaan masyarakat kepada Dinas.
- f. Adil, memiliki pengertian pelaksanaan pembangunan harus dapat dilakukan secara proporsional baik antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Untuk itu Dinas Pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selalu mengalokasikan program tidak hanya diwilayah Daratan tetapi juga di wilayah Kepulauan terutama untuk sentra penghasil dan daerah pengembangan tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah kepulauan.
- g. Profesional, memiliki pengertian bahwa semua proses pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara professional sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

3.2.2 TELAHAH MISI DAN PROGRAM

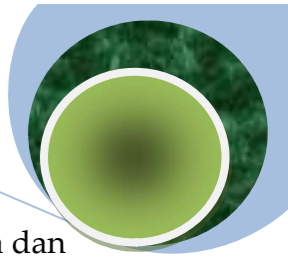
Dalam pelaksanaan kegiatan Visi Bupati dan Wakil Bupati maka dirumuskan dalam Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2016-2021, dari 6 Misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdapat 1 (satu) Misi yang secara langsung berkaitan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu **misi 3 : "Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi"**. Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan daya saing menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausahaan muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan; yang dilakukan melalui;

Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian unggulan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan serta mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat Regional dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut Dinas Pertanian



Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan fasilitasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin terutama dikalangan buruh tani dengan menitikberatkan pada;

1. Pemberdayaan Buruh Tani antara lain melalui ;
 - Bantuan Pengembangan usaha mandiri bagi buruh tani (PUAP)
 - Bantuan sarana produksi bagi buruh tani.
2. Pengembangan pola kemitraan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkeadilan, melalui
 - Pengembangan lembaga penyangga produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - Pengembangan Bapak angkat yang berkeadilan di Sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Pengembangan pertanian, hortikultura dan perkebunan berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan, melalui ;
 - Bantuan permodalan dan sarana produksi sektor Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berorientasi agribisnis.
 - Pengembangan diversifikasi pangan
4. Peningkatan infrastruktur ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi produksi masyarakat, melalui ;
 - Pembangunan Infrastruktur sektor pertanian, hortikultura dan perkebunan
5. Eksplorasi peningkatan daya saing sektor pertanian, melalui ;
 - Pelatihan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - Pelatihan pengurusan standar kesehatan bagi produk pertanian. Eksplorasi peningkatan daya saing sektor pertanian.
6. Meningkatkan produktifitas daya saing dan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, mengkaitkan produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan produk industri olahan lainnya.



Tabel

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bupati Sumenep yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep

MISI RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	Meningkatkan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian unggulan (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan)	Peningkatan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani




3.3. TELAHAH RESTRA DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

Telaah terhadap Restra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur diperlukan dalam upaya menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi serta program Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel
Kaitan RPJMN, Restra Kementan, Dinas Pertanian Provinsi dan
Dispertapa Sumenep

RPJMN 2015-2019	RESTRA KEMANTAN	RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI	RESTRA DISPERTAPANG, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMENEP
<p>NAWACITA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Agroindustri (Agenda 6 Nawacita, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 2. Peningkatan kedaulatan pangan (Agenda 7 Nawacita, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic) 	<p>7 Strategi Utama penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan (P3KP) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan Infrastruktur dan sarana pertanian 3. Pengembangan dan perluasan logistic benih/bibit 4. Penguatan kelembagaan petani 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan swasembada padi jagung secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan tanaman pangan utama lainnya 2. Perluasan areal tanam padi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air melalui JITUT/JIDES 3. Pengamanan produksi Tanaman pangan dan hortikultura 4. Peningkatan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura berbasis sumber daya local yang berkelanjutan 5. Peningkatan standart mutu produk 6. Peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani, untuk meningkatkan akses petani terhadap factor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura dalam upaya untuk mewujudkan swasembada padi dan jagung secara berkelanjutan dan tanaman pangan utama lainnya, melalui; Perluasan areal tanaman padi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian (Dam Parit, Rumah Pompa dan alsintan); 2. Meningkatkan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura, melalui; penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan industri pertanian hilir dan industri pertanian hulu serta jasa-jasa pendukungnya secara harmonis dan simultan untuk mendayagunakan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif, serta peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani untuk meningkatkan akses petani terhadap factor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan. 3. Meningkatkan Produksi Perkebunan. 4. Meningkatnya nilai tambah hasil produk Perkebunan. 5. Meningkatnya pemberdayaan petani perkebunan terhadap faktor produksi,teknologi,informasi,pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.

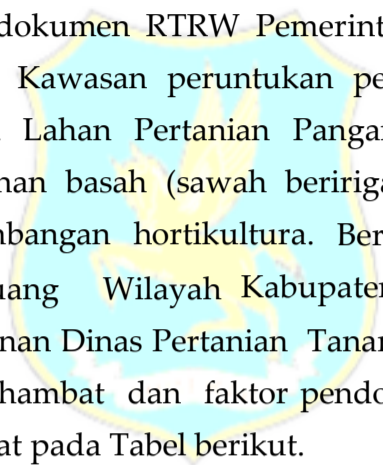
Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015– 2019. Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015–2019), setelah periode RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-3 ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penguatan permodalan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta



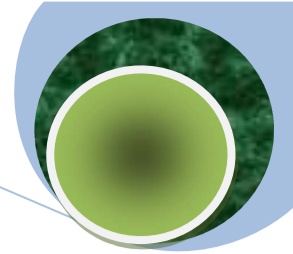
pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan, dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Pertanian serta Dinas perkebunan Provinsi Jawa Timur.

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah



Mengacu dokumen RTRW Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033, Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sumenep dimanfaatkan untuk Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) dengan rincian Pertanian lahan basah (sawah beririgasi), Pertanian lahan kering/non irigasi, dan pengembangan hortikultura. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2013 – 2033, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut.

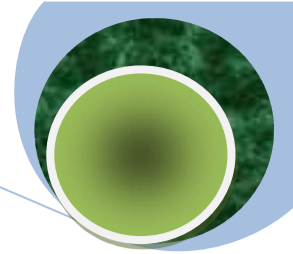


Tabel
Hasil Telaah RTRW Kabupaten Sumenep

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kawasan Peruntukan Pertanian : Pertanian Lahan irigasi luas kurang lebih 8.287,2 ha, ditetapkan sebagai LP2B meliputi 14 Kecamatan (Lenteng, Ambunten, Gapura, Batuan, Sumenep, Ganding, Saronggi, Dasuk, Manding, Batuputih, Nonggunong, Arjasa, Sapeken dan Kangayan) Pertanian Lahan Non Irigasi seluas kurang lebih 12.573 ha Lahan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 114.062 ha meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumenep	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Adanya Kebutuhan ketersediaan sdm, sda, dan sumberdaya buatan Peningkatan produksi dan konsumsi dapat direncanakan dengan baik Pemenuhan kebutuhan Saprodi dan Sarana Prasarana Belum menerapkan GAP untuk komoditas hortikultura dan Coperative Farming untuk komoditas tanaman pangan	Pertanian lahan beririgasi di 14 Kecamatan dan pertanian lahan non irigasi di seluruh Kecamatan Untuk kawasan tanaman hortikultura seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis terkait perubahan iklim global, krisis pangan dan energi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Perubahan iklim global sekarang ini akibat dari penerapan teknologi revolusi hijau budidaya pertanian sejak tahun 1970-an yang menyebabkan petani menggantungkan sepenuhnya pada penggunaan pupuk anorganik yang berakibat pada penurunan kandungan bahan organik tanah sawah. Selain kandungan bahan organik tanah, masih belum optimalnya penerapan sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP) pada produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Disisi lain, pertambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun di Kabupaten Sumenep justru menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.



Tabel
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pemerintah Kabupaten Sumenep


NO	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan	Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah	Upaya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik	Penerapan GAP Pengembangan Pupuk organik
2	Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan anomali iklim	Perubahan pola tanam dan serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	Rendahnya penggunaan pupuk dan pestisida organik	Penerapan pupuk dan pestisida organik
3	Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan belum optimal	Masih rendahnya sertifikasi dan pelabelan produk tanaman dan hortikultura oleh petani	Masih terdapat kasus penggunaan bahan tambahan yang berbahaya, terdapat residu pestisida, penggunaan pupuk kimia yang tidak terdaftar, tidak melakukan konservasi lahan dan tidak tercatatnya ketelusuran produk	1. PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 2. Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/200 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik (GAP-TP) 3. Permentan No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices); 4. Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur

Kesadaran masyarakat di seluruh dunia terhadap pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dalam kaitannya dengan usaha pertanian telah dipacu oleh berbagai keputusan konferensi internasional tentang lingkungan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Tantangan dalam pelaksanaan Program kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun kedepan dihadapkan pada beberapa beberapa permasalahan, antara lain :

1. Pasokan inovasi teknologi bagi petani dan aparatur masih kurang.
2. Belum tertatanya suatu mekanisme antar lembaga yang saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan pertanian
3. Produk-produk rakitan inovasi teknologi spesifik lokasi yang masih kurang.
4. Terbatasnya sarana prasarana pendukung peningkatan intensifikasi usahatani dan transfer teknologi.
5. Terbatasnya lahan yang subur untuk budidaya perkebunan.



Melihat dari kondisi berbagai permasalahan diatas maka diperoleh beberapa isu – isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian untuk pembangunan sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun ke depan , Isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Degradasi daya dukung lahan dan sumberdaya air
2. Ketergantungan pada pupuk anorganik masih tinggi sedangkan ketersediaannya terbatas
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usahatani
4. Tingginya fluktuasi harga hasil produksi pertanian
5. Eksistensi kelembagaan kelompok tani belum mantap
6. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
7. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;

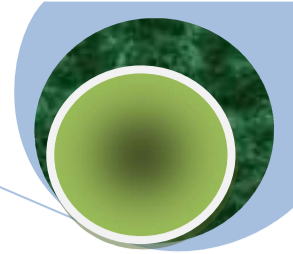
Apabila kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia sebagaimana diuraikan di muka, dikaji dan dianalisa lebih mendalam; akan dijumpai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threed), sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi mata pencaharian utama penduduk kabupaten Sumenep
2. Kemauan, ketekunan dan semangat petani yang tidak mudah menyerah terhadap kondisi alam yang kurang menguntungkan atau kurang bersahabat;
3. Sarana dan prasarana yang mendukung proses produksi dan distribusinya cukup memadai;
4. Memiliki komoditas pangan unggulan yang dapat dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun internasional;
5. Jumlah kelembagaan petani cukup tinggi, mengindikasikan kemauan petani untuk mengorganisir diri, berdemokrasi dan berpartisipasi;
6. Kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan bahwa sektor pertanian mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian rakyat dan mempunyai ketahanan yang tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi.

b. Kelemahan

1. Rata-rata pemilikan lahan petani tergolong kecil, sehingga efisiensi usaha tani sulit dicapai;
2. Terbatasnya sumber daya alam yang ada (khususnya air) dan beberapa diantaranya kualitasnya semakin menurun (antara lain kesuburan tanah);
3. Kualitas SDM petani yang relatif masih rendah, membatasi kemampuan petani dalam penguasaan dan inovasi teknologi, sehingga sistem budidaya yang digunakan masih banyak yang tradisional;
4. Rendahnya permodalan yang dipunyai petani, membatasi petani untuk membeli sarana produksi dan sarana pertanian;
5. Kelembagaan petani (walaupun jumlahnya besar) kemampuannya relative



masih rendah;

6. Minat generasi muda terhadap pertanian relatif rendah

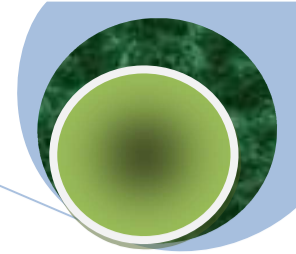
c. Peluang

1. Kebutuhan penduduk akan bahan pangan (khususnya beras) terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk;
2. Pasal lokal dan global terbuka serta potensial untuk ekspor hasil pangan, seperti jagung lokal Madura;
3. Berkembangnya industri makanan olahan dengan bahan baku hasil tanaman pangan, menjadi peluang pasar yang potensial;
4. Teknologi budidaya pertanian yang terus berkembang dan dikembangkan, baik untuk meningkatkan produktivitas maupun untuk meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan;
5. Tingginya animo masyarakat-petani untuk meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi dan penggunaan peralatan (sarana) pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani;
6. Tersedianya dana pembangunan pertanian yang cukup memadai yang secara otonom dapat direncanakan dan diarahkan sesuai kebutuhan lokal;

d. Tantangan

1. Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan-lahan pertanian produktif ke non pertanian, sehingga mengurangi luasan areal tanaman pangan;
2. Adanya potensi anomaly iklim/ cuaca, bencana alam dan ledakan serangan organisme pengganggu, akan berpengaruh terhadap produktivitas dan produksi tanaman pangan;
3. Produk olahan bahan pangan (lokal) kalah bersaing dengan produk pangan import dan pangan olahan import (fast food) yang lebih gencar dan lebih menarik promosinya;
4. Harga sarana produksi pertanian yang selalu meningkat, tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan petani;
5. Rendahnya insentif bagi petani (harga hasil, subsidi dan lainnya), menambah rendahnya kemampuan dan semangat petani untuk berusaha tani;
6. Rendahnya perhatian, kemauan dan kepercayaan swasta (pemilik modal dan pemilik jaringan pasar) untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan petani

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional” serta mengacu pada misi 3 (tiga) yaitu : Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi. Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 3 : Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi	1. Meningkatkan kesejahteraan petani 2. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan

Memperhatikan potensi, peluang, prospek pengembangan dan teknologi yang tersedia serta besarnya permintaan masyarakat untuk memenuhi berbagai permintaan, maka sasaran strategis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

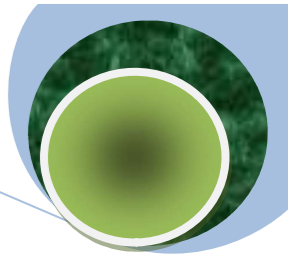
1. Meningkatnya Pendapatan Petani, sasaran ini akan dicapai melalui indikator:

a. Kenaikan Indek Nilai Tukar Petani (NTP)

2. Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan , Hortikultura Dan Perkebunan dalam upaya untuk mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi kelapa, tembakau, jambu mente, cabe jamu, siwalan secara berkelanjutan dan tanaman pangan utama lainnya, melalui; Perluasan areal tanaman padi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan (Dam Parit, Rumah Pompa dan alsintan) serta peningkatan kualitas bahan baku;

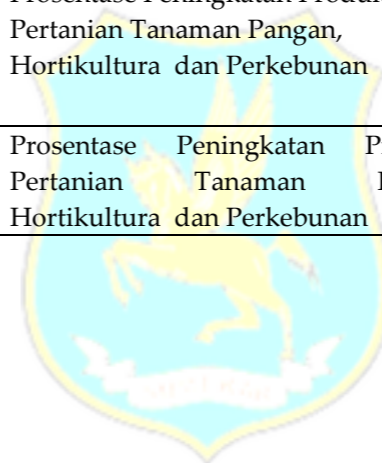
Sasaran ini diperoleh dengan indikator :

1. Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Prosentase Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan

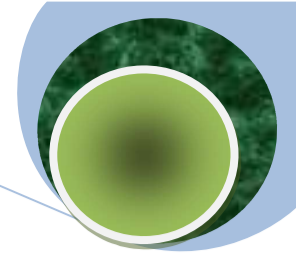


Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani	Kenaikan Indek NTP	-	-	101	101	102	103
2.	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan	2. Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4
			Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			0,5	1	2	2



BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN



5.1 Strategi

Strategi pembangunan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2016-2021 bertumpu pada pemberdayaan rakyat dan menempatkan strategi pro-poor sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan dan lainnya secara berkeadilan. Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan ekonomi pedesaan, serta usaha mikro dan kecil menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Sumenep menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor tersebut. Pemerataan pendapatan, melalui pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan ekonomi pedesaan, pengembangan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentaskan penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan.

Berdasarkan isu strategis saat ini serta hasil identifikasi potensi, peluang, maupun permasalahan bidang pertanian untuk lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan strategi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani**
2. **Penyediaan benih, prasarana dan sarana produksi pertanian**
3. **Penyediaan benih, prasarana dan sarana produksi perkebunan**

5.2 Kebijakan

Pembangunan pertanian harus merupakan *holistic policy*, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu, dibutuhkan integrasi maupun sinkronisasi program, baik antar tingkatan pemerintahan maupun koordinasi antar lembaga / unit satuan kerja dan dunia usaha beserta organisasi profesi lainnya. Secara umum, Kebijakan Pembangunan Pertanian Kabupaten Sumenep diarahkan untuk :

1. Peningkatan usaha pertanian/perkebunan local yang berdaya saing
2. Peningkatan produksi, produktivitas serta penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian
3. Peningkatan produksi, produktivitas serta penyediaan prasarana dan sarana produksi perkebunan

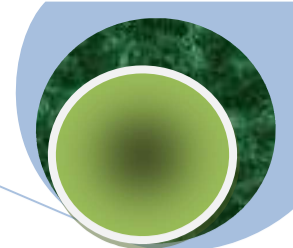


Arah kebijakan tersebut diimplementasikan kedalam Program Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut :

1. Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT);
3. Program Produksi Pertanian;
4. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan;
5. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
6. Program Produksi Perkebunan.

TABEL T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan dan Profesional		
MISI III	: Meningkatkan kemandirian perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani	1. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani	1. Peningkatan usaha pertanian/perkebunan lokal yang berdaya saing
Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Penyediaan benih, prasarana dan sarana produksi pertanian 2. Penyediaan benih, sarana dan prasarana produksi perkebunan	1. Peningkatan produksi, produktivitas serta penyediaan prasarana sarana produksi pertanian 2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan serta penyediaan sarana prasarana produksi perkebunan



BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program program pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi Program Produksi Pertanian, Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT), Program Produksi Perkebunan, dan Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) sebagai berikut :

1. Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah kelompok tani yang menjadi kelompok pengolah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada :

1. Penanganan Pemasaran Produk Pertanian/ Perkebunan
 - a) Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Untuk Pemasaran Produk Pertanian/Perkebunan.
 - b) Pameran Potensi Produk Pertanian/Perkebunan.
2. Kemitraan dan Temu Usaha Produk Pertanian/Perkebunan
 - a) Kemitraan Usaha Tani Komoditi Pertanian/Perkebunan
 - b) Temu Usaha Tani Komoditi Pertanian/Perkebunan
 - c) Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
3. Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Program ini bertujuan mencapai prosentase peningkatan jumlah kelompok wirausaha. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
2. Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat

3. Program Produksi Pertanian

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah produksi pertanian dan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada :

1. Intensifikasi Tanaman Pangan
2. Budidaya Pertanian Pada Lahan Kering
3. Budidaya Tanaman Hortikultura
4. Pembibitan/Perbenihan Tanaman
5. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman



4. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan

Program ini bertujuan untuk Peningkatan Prosentase jumlah prasarana dan sarana pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

1. Perencanaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air
4. Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi/ Pestisida
5. Pengadaan Alat Mesin Pertanian
6. Penerapan dan Pembiayaan Teknologi Pertanian
7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistem Pertanian Terpadu Di Daerah Dataran Tinggi (IDB)
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)

5. Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)

Program ini bertujuan untuk penerapan berbagai teknologi usaha tani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi, sehingga mampu menghasilkan produktivitas maksimal untuk menunjang peningkatan produksi secara berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

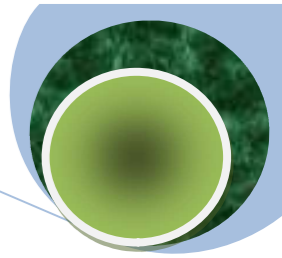
1. Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practices Tembakau
2. Penanganan Panen dan Pasca Panen
3. Dukungan Sarana Dan Prasarana Usaha Tani Tembakau
4. Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan
5. Penerapan Inovasi Teknis

6. Program Produksi Perkebunan

Program ini bertujuan peningkatan prosentase jumlah kelompok pengolah variasi produk hasil pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

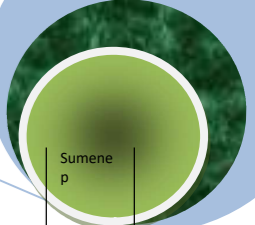
1. Intensifikasi Tanaman Perkebunan Tahunan
2. Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3. Intensifikasi Tanaman Perkebunan Semusim

Mengacu pada program OPD ini, dapat dijelaskan secara rinci sebagaimana tabel terlampir.

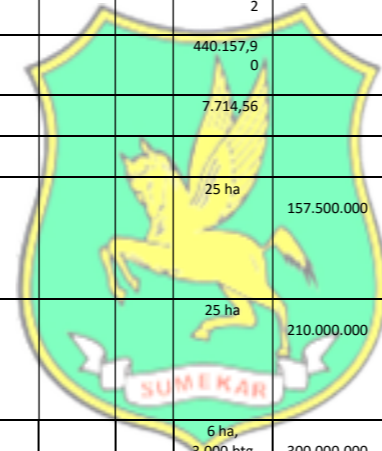


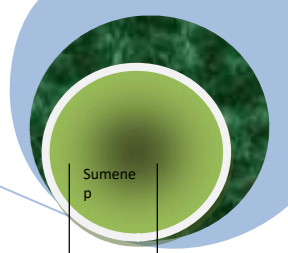
Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
Kabupaten Sumenep

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani		Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Prosentase kelompok tani yang menjadi kelompok pengolah						1.675.000.000		2.125.000.000		2.600.000.000		6.400.000.000	Dinas Pertanian		
			Kegiatan Penanganan Pemasaran Produk Pertanian/ Perkebunan	Jumlah petani pelaku usaha yang menggunakan aplikasi pemasaran online	50 klp			50 klp		500.000.000		60 klp	650.000.000	70 klp	750.000.000	70 klp	1.900.000.000		Sumenep
				Jumlah promosi produk pertanian yang dilaksanakan	3 kali			3 kali		325.000.000		3 kali	425.000.000	3 kali	550.000.000	9 kali	1.300.000.000		Sumenep
			Kegiatan Kemitraan Usaha Produk Pertanian/ Perkebunan	Jumlah kelompok yang melaksanakan kemitraan usaha	50 klp			50 klp		500.000.000		50 klp	600.000.000	50 klp	700.000.000	150 klp	1.800.000.000		Sumenep
				Jumlah temu usaha tani yang dilaksanakan	5 kali			5 kali		150.000.000		7 kali	250.000.000	9 kali	350.000.000	21 kali	750.000.000		Sumenep

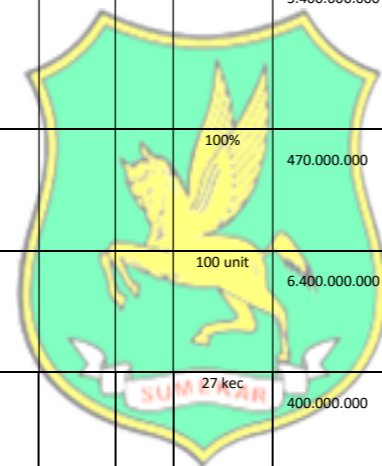


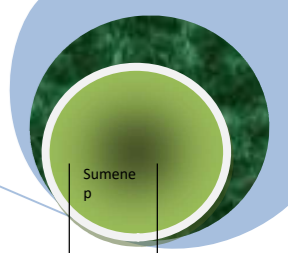
		Kegiatan Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah alat pengolahan hasil yang disediakan	10 pkt				10 pkt	200.000.000	10 pkt	200.000.000	12 pkt	250.000.000	32 pkt	650.000.000		Sumene p
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Prosentase peningkatan jumlah kelompok wirausaha						1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		4.200.000.000		
		Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah kelompok/tenaga kerja terampil yang diberikan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil	20 klp				20 klp	400.000.000	20 klp	400.000.000	20 klp	400.000.000	60 klp	1.200.000.000		Sumene p
		Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Jumlah bantuan sarana produksi, bibit/benih yang disediakan	20 pkt				20 pkt	1.000.000.000	20 pkt	1.000.000.000	20 pkt	1.000.000.000	60 pkt	3.000.000.000		Sumene p
Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Program Produksi Pertanian	Jumlah produksi tanaman pertanian						1.140.000.000		1.274.000.000		1.348.150.000		3.762.150.000		
			- Padi (ton)	232.170,12				232.170,12		237.525,12		241.088,00		241.088,00			
			- Jagung (ton)	440.157,90				440.157,90		450.684,29		457.444,55		457.444,55			
			- Kedelai (ton)	7.714,56				7.714,56		7.891,95		8.010,33		8.010,33			
		Kegiatan Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah luas tanam demplot tanaman pangan yang dilaksanakan	25 ha				25 ha	157.500.000	30 ha	173.250.000	35 ha	190.575.000	35 ha	521.325.000		Sumene p
		Kegiatan Budidaya Pertanian Pada Lahan Kering	Jumlah luas tanam demplot pertanian pada lahan kering yang dilaksanakan	25 ha				25 ha	210.000.000	30 ha	231.000.000	35 ha	233.100.000	35 ha	674.100.000		Sumene p
		Kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura	Jumlah luas tanam demplot tanaman hortikultura yang dilaksanakan	6 ha, 3.000 btg				6 ha, 3.000 btg	300.000.000	8 ha, 4.000 btg	350.000.000	10 ha, 5.000 btg	400.000.000	10 ha, 5.000 btg	1.050.000.000		Sumene p



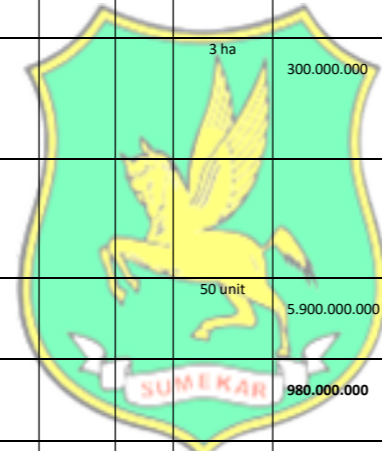


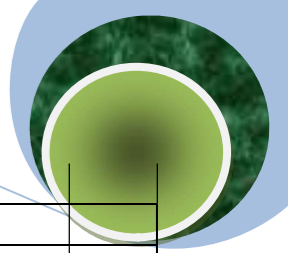
		Kegiatan Pembibitan/Perbenihan Tanaman	Jumlah kelompok yang memproduksi benih bersertifikat	10 klp				10 klp	157.500.000	11 klp	173.250.000	12 klp	174.825.000	12 klp	505.575.000		Sumenep
		Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan pengendalian hama dan penyakit	20 kali				20 kali	315.000.000	20 kali	346.500.000	20 kali	349.650.000	60 kali	1.011.150.000		Sumenep
		Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dengan kebutuhannya						33.800.000.000		37.980.000.000		38.145.000.000		109.925.000.000		
		Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah penyediaan perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian	15 pkt				15 pkt	650.000.000	15 pkt	650.000.000	15 pkt	650.000.000	45 pkt	1.950.000.000		Sumenep
		Kegiatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan LP2B	4 Kecamatan				4 Kec.	480.000.000	5 Kec.	500.000.000	5 Kec.	520.000.000	14 kec.	1.500.000.000		Sumenep
		Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air	Jumlah pembangunan/rehab infrastruktur pertanian yang dilaksanakan	20 unit				20 unit	5.400.000.000	20 unit	5.450.000.000	20 unit	5.500.000.000	60 unit	16.350.000.000		Sumenep
		Kegiatan Pengawasan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi/Pestisida	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan pengawasan pupuk bersubsidi/pestisida	100%				100%	470.000.000	100%	480.000.000	100%	500.000.000	100%	1.450.000.000		Sumenep
		Kegiatan Pengadaan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	100 unit				100 unit	6.400.000.000	100 unit	10.450.000.000	100 unit	10.500.000.000	300 unit	27.350.000.000		Sumenep
		Kegiatan Penyediaan informasi teknologi dalam sistem penyuluhan pertanian	Jumlah penyediaan informasi dalam sistem penyuluhan pertanian	27 kec				27 kec	400.000.000	27 kec	450.000.000	27 kec	475.000.000	27 kec	1.325.000.000		Sumenep





			Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistem Pertanian Terpadu Di Daerah Dataran Tinggi (IDB)	Jumlah luasan terkelola dengan penyediaan sarana dan prasarana terpadu yang dilaksanakan	bawang 150 ha, cabe rawit 50 ha				bawang 150 ha, cabe rawit 50 ha	10.000.000.000	bawang 150 ha, cabe rawit 50 ha	10.000.000.000	bawang 150 ha, cabe rawit 50 ha	10.000.000.000	bawang 150 ha, cabe rawit 50 ha	30.000.000.000		Sumenep
			Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	60 unit				60 unit	10.000.000.000	60 unit	10.000.000.000	60 unit	10.000.000.000	180 unit	30.000.000.000		Sumenep
			Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)	1. Jumlah penyediaan bahan baku (tembakau) berkualitas						9.460.000.000		9.855.000.000		9.900.000.000		29.215.000.000		
			Kegiatan Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practices Tembakau	Jumlah pembudidayaan bibit tembakau nikotin rendah yang dilaksanakan	5 ha				5 ha	1.000.000.000	5 ha	1.250.000.000	5 ha	1.250.000.000	5 ha	3.500.000.000		Sumenep
			Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen	Jumlah sarana dan prasarana panen dan pasca panen yang disediakan	48 unit				48 unit	1.900.000.000	48 unit	1.900.000.000	48 unit	1.900.000.000	48 unit	5.700.000.000		Sumenep
			Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah penumbuhan/penguatan kelembagaan yang dilaksanakan	10 klp				10 klp	360.000.000	10 klp	380.000.000	10 klp	400.000.000	30 klp	1.140.000.000		Sumenep
			Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis	Jumlah luas demplot penangkaran benih tembakau varietas unggul	3 ha				3 ha	300.000.000	3 ha	325.000.000	3 ha	350.000.000	3 ha	975.000.000		Sumenep
				2. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas bahan baku														
			Kegiatan Dukungan Sarana Dan Prasarana Usaha Tani Tembakau	Jumlah sarana dan prasarana usaha tani tembakau disediakan	50 unit				50 unit	5.900.000.000	50 unit	6.000.000.000	50 unit	6.000.000.000	150 unit	17.900.000.000		Sumenep
			Program Produksi Perkebunan	Jumlah produksi komoditi perkebunan						980.000.000		1.040.000.000		1.130.000.000		3.150.000.000		
				- Kelapa (ton)						42.241,18		42.663,92		42.663,92		42.663,92		
				- Cabe Jamu (ton)						9.865,28		9.868,31		9.868,31		9.868,31		





				- Jambu Mete (ton)						4.822,48		4.822,31		4.822,31		4.822,31		
				- Siwalan (ton)						776,37		776,37		776,37		776,37		
				- Tembakau (ton)						8.838,75		9.242,28		9.242,28		9.242,28		
			Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan Tahunan	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan tahunan yang dilaksanakan	10 ha					10 ha	380.000.000	10 ha	400.000.000	10 ha	430.000.000	10 ha	1.210.000.000	Sumenep
			Kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah tanaman perkebunan yang diremajakan/tertangani	500 btg					500 btg	300.000.000	500 btg	320.000.000	500 btg	350.000.000	1500 btg	970.000.000	Sumenep
			Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan Semusim	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan semusim yang dilaksanakan	10 ha					10 ha	300.000.000	10 ha	320.000.000	10 ha	350.000.000	10 ha	970.000.000	Sumenep



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 3 : Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi	1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan 2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan

7.2. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

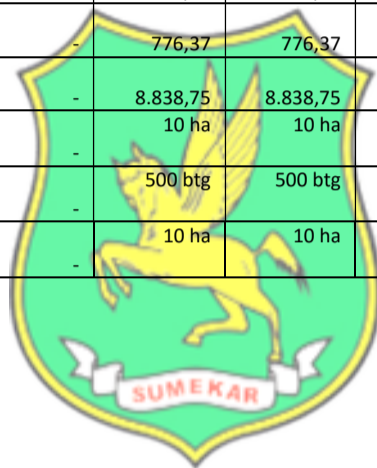
Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Sumenep dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) Kabupaten Sumenep, dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	5	6	7	8	9	10
A	Prosentase kelompok tani yang menjadi kelompok pengolah	-	2%	2%	2%	2%	2%
1							
1.1	Jumlah petani pelaku usaha yang menggunakan aplikasi pemasaran online	-	20 klp	20 klp	25 klp	30 klp	30 klp
1.2	Jumlah promosi produk pertanian yang dilaksanakan	-	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
2		-					
2.1	Jumlah kelompok yang melaksanakan kemitraan usaha	-	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp
2.2	Jumlah temu usaha tani yang dilaksanakan	-	5 kali	5 kali	7 kali	9 kali	9 kali
2.3	Jumlah penyediaan bantuan alat pengolahan hasil pertanian/perkebunan	-	20 pkt	20 pkt	20 pkt	20 pkt	20 pkt
3	Jumlah alat pengolahan hasil yang disediakan	-	5 pkt	10 pkt	10 pkt	12 pkt	12 pkt

B	Jumlah kelompok wirausaha yang dibina	-	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp
1	Jumlah kelompok/tenaga kerja terampil yang diberikan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil	-	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp
2	Jumlah bantuan sarana produksi, bibit/benih yang disediakan	-	20 pkt	20 pkt	20 pkt	20 pkt	20 pkt
C							
	1. Jumlah Produksi Padi (ton)	-	232.170,12	232.170,12	237.525,12	241.088,00	241.088,00
	2. Jumlah Produksi Jagung (ton)	-	440.157,90	440.157,90	450.684,29	457.444,55	457.444,55
	3. Jumlah Produksi Kedelai (ton)	-	7.714,56	7.714,56	7.891,95	8.010,33	8.010,33
	4. Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton)	-	52.283,14	52.283,14	54.897,30	57.642,16	57.642,16
	5. Jumlah Produksi Bawang Merah (kw)	-	5.147,00	5.147,00	5.157,29	5.193,46	5.193,46
	6. Jumlah Produksi Cabe Rawit (kw)	-	3.488,54	3.488,54	3.495,52	3.520,03	3.520,03
1	Jumlah luas tanam demplot tanaman pangan yang dilaksanakan	-	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha
2	Jumlah luas tanam demplot pertanian pada lahan kering yang dilaksanakan	-	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha
3	Jumlah luas tanam demplot tanaman hortikultura yang dilaksanakan	-	6 ha	6 ha	6 ha	6 ha	6 ha
4	Jumlah kelompok yang memproduksi benih bersertifikat	-	10 klp	10 klp	11 klp	12 klp	12 klp
5	Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman	-	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali
D	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana pertanian dengan kebutuhannya	-	10%	10%	20%	30%	30%
	- Jaringan Irigasi	-	30%	30%	30%	30%	30%
	- Embung	-	5%	5%	5%	5%	5%
	- Jalan Pertanian	-	25%	25%	10%	10%	10%
	- Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam (Pengeboran, Pembangunan Rumah Pompa dan kelengkapannya)	-	50%	50%	50%	50%	50%
	- Long Storage	-	100%	100%	100%	100%	100%
	- Dam Parit	-	25%	25%	10%	10%	10%
	- Hand Traktor	-	25%	25%	25%	25%	25%
	- Combine Harvester	-	100%	100%	100%	100%	100%
	- Rice Transplanter	-	100%	100%	100%	100%	100%
	- RMU	-	50%	50%	50%	50%	50%
	- Alat Penggiling Jagung	-	100%	100%	100%	100%	100%
	- Alat Pemipil Jagung	-	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kendaraan Roda-3	-	5%	5%	5%	5%	5%
1	Jumlah penyediaan perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian	-	52 pkt	52 pkt	52 pkt	52 pkt	52 pkt
2	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan LP2B	-	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec
3	Jumlah pembangunan/rehab infrastruktur pertanian yang dilaksanakan	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi/pestisida	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	-	20 unit	20 unit	20 unit	30 unit	30 unit
7	Jumlah penyediaan informasi dalam sistem penyuluhan pertanian	-	27 Kec.	27 Kec.	27 Kec.	27 Kec.	27 Kec.
8	Jumlah luasan terkelola dengan penyediaan sarana dan prasarana terpadu yang dilaksanakan	-	200 ha	200 ha	200 ha	200 ha	200 ha
9	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	-	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit

E							
	1. Jumlah penyediaan bahan baku (tembakau) berkualitas	-	75.000.000 btg	75.000.000 btg	75.000.000 btg	75.000.000 btg	75.000.000 btg
1	Jumlah pembudidayaan bibit tembakau nikotin rendah yang dilaksanakan	-	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha	5 ha
2	Jumlah penumbuhan/ penguatan kelembagaan yang dilaksanakan	-	10 klp	10 klp	10 klp	10 klp	10 klp
3	Jumlah luas demplot penangkaran benih tembakau varietas unggul	-	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha
4	Jumlah sarana dan prasarana panen dan pasca panen yang disediakan	-	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit
	2. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas bahan baku	-	17 unit	17 unit	20 unit	30 unit	30 unit
5	Jumlah sarana dan prasarana usaha tani tembakau yang disediakan	-	17 unit	17 unit	20 unit	30 unit	30 unit
		-					
F		-					
	1. Jumlah produksi Kelapa (ton)	-	42.241,18	42.241,18	42.663,92	42.663,92	42.663,92
	2. Jumlah produksi Cabe Jamu (ton)	-	9.865,28	9.865,28	9.868,31	9.868,31	9.868,31
	3. Jumlah produksi Jambu Mete (ton)	-	4.822,48	4.822,48	4.822,31	4.822,31	4.822,31
	4. Jumlah produksi Siwalan (ton)	-	776,37	776,37	776,37	776,37	776,37
	5. Jumlah produksi Tembakau (ton)	-	8.838,75	8.838,75	9.242,28	9.242,28	9.242,28
1	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan tahunan yang dilaksanakan	-	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha
2	Jumlah tanaman perkebunan yang diremajakan/tertangani	-	500 btg	500 btg	500 btg	500 btg	500 btg
3	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan semusim yang dilaksanakan	-	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha



BAB VIII

PENUTUP

Masih belum tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan indikator yang menunjukkan adanya keterbatasan dan kendala di lapangan yang belum mampu diatasi. Oleh karena itu pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dimasa yang akan datang perlu disikapi lebih baik dalam bentuk langkah-langkah operasional yang utuh dan kongkrit, khususnya pada peningkatan kinerja pelaksana pembangunan. Disadari bahwa pada prinsipnya peningkatan kinerja itu akan dapat dicapai apabila didukung oleh sumberdaya manusia, sumberdaya alam, inovasi – inovasi teknologi terapan, aspek kelembagaan yang memadai, iklim usaha yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Disamping itu dalam pelaksanaan program diperlukan adanya persamaan persepsi dalam menyikapi segala problematika yang dihadapi serta upaya-upaya pemecahannya. Dengan demikian akan terjadi kesatuan pemikiran dan tindakan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dana APBN.

Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2021 ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Perumusan dan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) ini disusun dengan upaya seoptimal mungkin dengan mengacu pada propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Sumenep 2013-2033.

Kiranya dalam penulisan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran khususnya dalam penerapannya nanti dilapangan sangat kami harapkan.

PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Strategi RPJMD	Kebijakan RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi	1. Meningkatkan perekonomian daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Nilai Tukar Petani	Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian unggulan (tanaman pangan dan perkebunan)	Peningkatan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani
				2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	1. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (F)	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program (F)/ Capaian Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (F)/ Keluaran	Rincian Indikator	Pelaksana			
														Bidang	Seksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya pendapatan petani	Kenaikan indeks NTP	Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani	Peningkatan usaha pertanian/perkebunan lokal yang berdaya saing	Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya jumlah kelompok tani pengolah	Prosentase kelompok tani yang menjadi kelompok pengolah	Penanganan Pemasaran Produk Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya pemasaran produk pertanian/perkebunan	Jumlah petani pelaku usaha yang menggunakan aplikasi pemasaran online	Aplikasi pemasaran online	Kabid Pengolahan dan Pemasaran	Kasi Pemasaran		
												Jumlah promosi produk pertanian yang dilaksanakan	Pameran dan gelar produk				
												Kemitraan Usaha Produk Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya pengelolaan kemitraan usaha tani pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok yang melaksanakan kemitraan usaha	Kemitraan usaha		Kasi Bimbingan Usaha
												Jumlah temu usaha tani yang dilaksanakan	Temu Usaha				
												Jumlah penyediaan bantuan alat pengolahan hasil pertanian/perkebunan	Alat pengolahan hasil pertanian/perkebunan				
												Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya petani pengusaha olahan pertanian	Jumlah alat pengolahan hasil yang disediakan	Alat pengolahan hasil		Kasi Pengolahan
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Meningkatnya jumlah kelompok wirausaha	Jumlah kelompok wirausaha yang dibina	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Meningkatnya kemampuan kerja kelompok tani/wirausaha	Jumlah kelompok/tenaga kerja terampil yang diberikan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil	Kelompok/tenaga kerja terampil	Kabid Pengolahan dan Pemasaran	Kasi Bimbingan Usaha		
												Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Meningkatnya kemampuan kelompok tani/wirausaha dalam pembedayaan tanaman dan usaha tani	Jumlah bantuan sarana produksi, bibit/benih yang disediakan	Benih/bibit tanaman dan sarana produksinya		Kasi Bimbingan Usaha
2	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prosentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Penyediaan benih, prasarana dan sarana produksi pertanian	Peningkatan produksi, produktivitas serta penyediaan prasarana sarana produksi pertanian	Program Produksi Pertanian	Meningkatnya produksi komoditi pertanian	1. Jumlah Produksi Padi (ton); 2. Jumlah Produksi Jagung (ton); 3. Jumlah Produksi Kedelai (ton); 4. Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton) 5. Jumlah Produksi Bawang Merah (kw) 6. Jumlah Produksi Cabe Rawit (kw)	Intensifikasi Tanaman Pangan	Meningkatnya luas tanam komoditi pangan utama	Jumlah luas tanam demplot tanaman pangan yang dilaksanakan	Demplot tanaman pangan	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kasi Produksi Tanaman Pangan		
												Budidaya Pertanian Pada Lahan Kering	Meningkatnya luas tanam tanaman lahan kering	Jumlah luas tanam demplot pertanian pada lahan kering yang dilaksanakan	Demplot pertanian lahan kering		Kasi Produksi Tanaman Pangan
												Budidaya Tanaman Hortikultura	Meningkatnya luas tanam tanaman hortikultura	Jumlah luas tanam demplot tanaman hortikultura yang dilaksanakan	Demplot tanaman hortikultura		Kasi Produksi Hortikultura
												Pembibitan/Perbenihan Tanaman	Meningkatnya kualitas penangkaran bibit/benih tanaman	Jumlah kelompok yang memproduksi benih bersertifikat	Pembinaan dan penumbuhan kelompok penangkar benih		Kasi Perbenihan dan Perlindungan
												Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Meningkatnya pengetahuan dan penanganan tanaman yang terkena serangan hama/penyakit	Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan pengendalian hama dan penyakit	Sosialisasi gerakan pengendalian hama terpadu		Kasi Perbenihan dan Perlindungan TPH
							Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana pertanian dengan kebutuhannya	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya kualitas infrastruktur pertanian	Jumlah penyediaan perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian	Sharing dana APBN, DAK dan APBD I	Kabid Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (F)	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program (F)/ Capaian Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (F)/ Keluaran	Rincian Indikator	Pelaksana	
														Bidang	Seksi
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14
										Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Meningkatnya luas lahan pertanian yang dilindungi dan diamankan melalui LP2B	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan LP2B	Perlindungan dan pengamanan lahan pertanian		Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
										Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan infrastruktur pertanian yang berdaya guna	Jumlah pembangunan/rehab infrastruktur pertanian yang dilaksanakan	Pembangunan infrastruktur pertanian		Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
										Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi/ Pestsida	Meningkatnya pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi/pestisida sehingga tepat sasaran/sesuai peruntukannya	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi/pestisida	Pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk		Kasi Pupuk, Pestsida dan Alsintan
										Pengadaan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian yang berdaya guna	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	Handtraktor, Pompa air, Cultivator, Corn Sheller,Cooper dll		Kasi Pupuk, Pestsida dan Alsintan
										Penyediaan informasi teknologi dalam sistem penyuluhan pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan penyuluh pertanian dan kelompok tani dalam pengelolaan pertanian	Jumlah penyediaan informasi dalam sistem penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan dan penyediaan informasi pertanian		Kasi Penyuluhan
										Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistem Pertanian Terpadu Di Daerah Dataran Tinggi (IDB)	Meningkatnya pengelolaan pertanian di daerah dataran tinggi	Jumlah luasan terkelola dengan penyediaan sarana dan prasarana terpadu yang dilaksanakan	Demplot tanaman dataran tinggi		Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
										Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	Pompa Air, JUT, Japrod, Embung, Jaringan irigasi, dll		Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
				Prosentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan benih, sarana dan prasarana produksi perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan serta penyediaan sarana prasarana produksi perkebunan	Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)	Meningkatnya bahan baku (tembakau) berkualitas serta sarana dan prasarana pendukungnya	1. Jumlah penyediaan bahan baku (tembakau) berkualitas	Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practices Tembakau	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kelompok dalam pembudidayaan tembakau	Jumlah pembudidayaan bibit tembakau nikotin rendah yang dilaksanakan	Pembibitan tanaman tembakau varietas kebutuhan pabrik	Kabid Perkebunan	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
										Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani tembakau	Jumlah penumbuhan/ penguatan kelembagaan yang dilaksanakan	Penumbuhan/penguatan kelompok petani tembakau		Kasi Produksi Tanaman Tahunan
										Penerapan Inovasi Teknis	Meningkatnya kemampuan kelompok dalam penerapan inovasi teknis budidaya tembakau	Jumlah luas demplot penangkaran benih tembakau varietas unggul	Benih tembakau nikotin rendah		Kasi Produksi Tanaman Semusim
										Penanganan Panen dan Pasca Panen	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana panen dan pasca panen tembakau	Jumlah sarana dan prasarana panen dan pasca panen yang disediakan	Alat perajang tembakau, Kendaraan roda 3, dll		Kasi Produksi Tanaman Semusim
									2. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas bahan baku	Dukungan Sarana Dan Prasarana Usaha Tani Tembakau	Meningkatnya sarana dan prasarana usaha tani tembakau untuk mendukung peningkatan kualitas bahan baku tembakau	Jumlah sarana dan prasarana usaha tani tembakau yang disediakan	Embung, Hand traktor, dll	Kabid Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Kasi Pupuk, Pestsida dan Alsintan
							Program Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	1. Jumlah produksi Kelapa (ton); 2. Jumlah produksi Cabe Jamu (ton); 3. Jumlah produksi Jambu Mete (ton); 4. Jumlah produksi Siwalan (ton); 5. Jumlah produksi Tembakau (ton)	Intensifikasi Tanaman Perkebunan Tahunan	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan tahunan	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan tahunan yang dilaksanakan	Demplot tanaman perkebunan tahunan	Kabid Perkebunan	Kasi Produksi Tanaman Tahunan
										Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Meningkatnya tanaman perkebunan (kelapa) yang terlindungi dari serangan hama penyakit	Jumlah tanaman perkebunan yang diremajakan/tertangani hama penyakit	Peremajaan tanaman kelapa		Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
										Intensifikasi Tanaman Perkebunan Semusim	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan semusim	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan semusim yang dilaksanakan	Demplot tanaman perkebunan semusim		Kasi Produksi Tanaman Semusim

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
Kabupaten Sumenep

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.630.000	6.630.000	7.332.000	7.332.000		4.314.000	6.461.000	7.300.500	7.328.000		65,07%	97,45%	99,57%	99,95%	3,53%	90,51%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		124.436.000	167.400.000	155.400.000	188.520.000		97.341.301	142.738.449	141.774.222	181.813.821		78,23%	85,27%	91,23%	96,44%	16,22%	87,79%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			15.700.000	9.900.000	2.400.000			7.606.500	6.176.800	2.369.000			48,45%	62,39%	98,71%	-56,35%	69,85%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		7.209.000	7.209.000	8.100.000	51.900.000		6.313.975	6.929.000	7.976.100	51.642.400		87,58%	96,12%	98,47%	99,50%	184,37%	95,42%
Penyediaan Alat Tulis Kantor		19.116.019	19.116.029	22.159.983	22.202.000		19.107.000	19.115.500	22.112.000	22.175.500		99,95%	100,00%	99,78%	99,88%	5,37%	99,90%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		16.273.900	16.273.900	20.200.000	19.972.200		14.236.050	16.221.900	20.174.500	19.932.350		87,48%	99,68%	99,87%	99,80%	7,67%	96,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		11.940.000	11.940.000	13.540.000	13.540.000		9.776.900	11.940.000	13.540.000	13.540.000		81,88%	100,00%	100,00%	100,00%	4,47%	95,47%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		9.940.000	26.780.000	38.500.000	32.020.000		9.896.000	24.178.000	38.494.500	31.916.000		99,56%	90,28%	99,99%	99,68%	65,45%	97,38%
Penyediaan Makanan dan Minuman		16.880.000	16.880.000	21.810.000	21.810.000		16.548.500	16.802.100	21.794.000	21.551.500		98,04%	99,54%	99,93%	98,81%	9,74%	99,08%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		85.639.650	94.203.615	141.800.000	147.310.000		84.251.500	94.201.700	141.560.350	147.309.583		98,38%	100,00%	99,83%	100,00%	21,47%	99,55%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		9.646.000	10.610.000	13.000.000	13.000.000		9.610.000	10.600.000	12.875.000	12.892.050		99,63%	99,91%	99,04%	99,17%	10,84%	99,44%
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran				43.800.000					43.680.000					99,73%	-		99,73%
Operasional UPTD Pertanian			27.540.000	31.212.000	31.212.000			26.865.000	23.112.000	31.009.500			97,55%	74,05%	99,35%	6,67%	90,32%
Fasilitas Pelaksanaan Hari-Hari Khusus				43.930.000	43.930.000				43.810.000	43.489.500				99,73%	99,00%	0,00%	99,36%
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			243.610.000					243.610.000					100,00%		-		100,00%
Pembangunan Gedung Kantor		78.906.000					78.249.450					99,17%			-		99,17%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		66.300.000	95.000.000				64.975.000	91.699.000				98,00%	96,53%			-56,71%	97,26%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		61.286.000	202.600.000	61.260.800	17.360.000		58.231.000	195.370.750	60.300.000	15.610.000		95,02%	96,43%	98,43%	89,92%	29,72%	94,95%
Pengadaan Mebelair				59.150.000	12.050.000				58.250.000	11.988.000				98,48%	99,49%	-79,63%	98,98%
Pengadaan Komputer				40.530.000	24.030.000				38.000.000	22.400.000				93,76%	93,22%	-40,71%	93,49%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		80.855.000	48.665.000	60.287.500	42.000.000		79.327.500	48.640.000	57.875.000	41.885.000		98,11%	99,95%	96,00%	99,73%	-15,42%	98,45%
Pemeliharaan Berkala/Rutin Kendaraan Dinas/Operasional		56.610.000	68.021.517	60.121.517	47.800.000		52.368.220	67.966.150	59.992.700	47.795.500		92,51%	99,92%	99,79%	99,99%	-3,98%	98,05%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		10.000.000	8.000.000	8.000.000	11.000.000		5.430.000	7.960.000	8.000.000	11.000.000		54,30%	99,50%	100,00%	100,00%	5,83%	88,45%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		1.500.000	2.100.000	2.095.000	2.100.000		71,43%	100,00%	99,76%	100,00%	0,00%	92,80%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	10.996.000	11.000.000	11.000.000		100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			100.000.000	220.400.000	170.400.000			98.888.900	219.510.000	169.496.000			98,89%	99,60%	99,47%	48,86%	99,32%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			128.800.000					127.477.500					98,97%		-		98,97%
Pendidikan dan Pelatihan Formal		30.000.000	10.000.000	10.000.000	4.500.000		30.000.000	9.435.000	10.000.000	4.500.000		100,00%	94,35%	100,00%	100,00%	-40,56%	98,59%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		28.482.000	28.383.000	26.060.000	23.660.000		28.008.050	28.326.900	25.988.200	23.635.200		98,34%	99,80%	99,72%	99,90%	-5,91%	99,44%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		28.328.198	26.617.500	22.240.000	16.790.000		25.702.500	25.175.350	22.227.000	16.777.000		90,73%	94,58%	99,94%	99,92%	-15,66%	96,29%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		37.947.000	32.950.000	29.655.000	21.955.000		33.207.550	32.792.850	28.902.000	21.854.500		87,51%	99,52%	97,46%	99,54%	-16,38%	96,01%
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani			85.000.000					83.550.000					98,29%		-		98,29%
Pemantapan Kelembagaan dan Pemberdayaan KTNA		35.825.000		57.000.000			28.781.000		54.468.000			80,34%		95,56%		-100,00%	87,95%
Peningkatan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan				48.939.200					43.784.400					89,47%		-	89,47%
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		125.000.000	123.160.000	116.392.500	54.502.500		122.648.000	122.646.950	116.184.000	53.901.500		98,12%	99,58%	99,82%	98,90%	-20,05%	99,10%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan Desa Mandiri Pangan		85.000.000	137.227.800				81.126.750	135.058.000				95,44%	98,42%			-38,56%	96,93%
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija		100.000.000	34.340.000	79.449.000	28.477.000		89.519.950	29.017.500	72.859.000	11.836.000		89,52%	84,50%	91,71%	41,56%	0,51%	76,82%
Pengembangan Diversifikasi Tanaman		101.250.000	81.133.000	92.673.000	22.015.000		86.003.300	77.200.500	87.926.700	12.760.000		84,94%	95,15%	94,88%	57,96%	-27,30%	83,23%
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering		106.945.000	104.528.771	248.765.000	36.302.000		93.207.000	85.045.000	237.363.750	13.999.750		87,15%	81,36%	95,42%	38,56%	16,77%	75,62%
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan		257.900.000	44.940.000	104.550.000	32.755.500		178.248.250	41.124.200	90.408.300	26.051.900		69,12%	91,51%	86,47%	79,53%	-6,20%	81,66%
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya			110.975.500	137.150.000	46.787.000			110.975.000	136.378.900	45.766.710			100,00%	99,44%	97,82%	-21,15%	99,09%
Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan perdesaan					69.697.350					69.695.550				100,00%			100,00%
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian				437.054.000					414.438.500					94,83%			94,83%
Operasional Identifikasi dan Perumusan Program dan Kegiatan		40.535.000	305.430.000	14.600.000	14.600.000		40.372.800	304.420.850	14.353.500	14.577.500		99,60%	99,67%	98,31%	99,85%	186,09%	99,36%
Pengembangan Hortikultura Tanaman Semusim		103.750.000	59.877.000	60.927.000	18.421.500		96.881.000	59.876.900	49.957.500	18.195.000		93,38%	100,00%	82,00%	98,77%	-36,77%	93,54%
Administrasi Prasarana dan Sarana Pertanian			164.330.000					163.365.900					99,41%				99,41%
Administrasi Kegiatan Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan			3.589.000					3.581.000					99,78%				99,78%
Optimalisasi Ketahanan Pangan				90.000.000	32.588.000				89.075.500	32.312.900				98,97%	99,16%	-63,79%	99,06%
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian				1.044.600.000	600.000.000				1.040.149.000	596.839.000				99,57%	99,47%	-42,56%	99,52%
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan			194.210.000	93.692.500	47.362.500			186.859.089	93.023.250	47.259.500			96,21%	99,29%	99,78%	-50,60%	98,43%
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan				172.200.000	30.530.000				170.216.050	29.659.400				98,85%	97,15%	-82,27%	98,00%
Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan				2.577.000	9.525.000				2.577.000	9.371.000				100,00%	98,38%	269,62%	99,19%
Perencanaan dan Monitoring Prasarana dan Sarana Pertanian				71.000.000	51.597.000				70.800.000	51.354.000				99,72%	99,53%		99,62%
Administrasi Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (WISMP)			150.985.000					126.470.000					83,76%				83,76%
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Loan WISMP-2)				67.260.000	155.607.000				65.360.000	142.388.950				97,18%	91,51%	131,35%	94,34%
Fasilitasi dan Monitoring Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif				25.000.000	45.611.000				25.000.000	44.550.500				100,00%	97,67%	82,44%	98,84%
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					20.795.000					20.785.000					99,95%		99,95%
Pengembangan Pangan Lokal					29.304.000					29.261.750					99,86%		99,86%
Optimalisasi Perluasan Cetak Lahan Sawah Baru			80.600.000					20.200.000					25,06%				25,06%
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian		808.029.000					802.485.000					99,31%					99,31%
Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan		175.000.000					163.789.000					93,59%					93,59%
Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Buah		107.780.000					101.557.400					94,23%					94,23%
Administrasi Prasarana dan Sarana Pertanian		100.000.000					96.446.000					96,45%					96,45%
Administrasi Kegiatan Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan		1.450.000					168.000					11,59%					11,59%
Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif		63.000.000					63.000.000					100,00%					100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		413.357.000		349.400.000	197.209.950		407.668.900		333.677.500	194.806.998		98,62%		95,50%	98,78%	-71,78%	97,64%
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		45.000.000					43.407.000					96,46%					96,46%
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan		158.642.000	47.900.000	91.791.000	30.483.000		157.599.000	47.805.000	90.309.000	30.405.200		99,34%	99,80%	98,39%	99,74%	-14,99%	99,32%
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan		25.000.000	137.054.000				24.930.800	112.058.400				99,72%	81,76%			348,22%	90,74%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan				148.007.000	106.778.000				147.820.600	106.628.750				99,87%	99,86%	-27,86%	99,87%
Monitoring dan Pengawasan Pupuk/ Pesticida		50.000.000	97.060.000	100.322.000	25.081.000		46.472.500	96.133.500	100.272.000	24.805.692		92,95%	99,05%	99,95%	98,90%	7,49%	97,71%
Pengawasan Pupuk Bersubsidi				162.800.000					148.700.000					91,34%			91,34%
Pemberdayaan HIPPA dan GHIPPA			39.320.000	25.000.000				39.267.000	24.825.000				99,87%	99,30%		-136,42%	99,58%
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan		50.000.000	154.007.000				49.916.000	153.176.750				99,83%	99,46%			108,01%	99,65%
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan		778.614.000					773.611.750					99,36%					99,36%
Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)				7.070.697.000	8.280.680.000				7.049.121.000	8.209.395.000				99,69%	99,14%	17,11%	99,42%
Monitoring Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian				125.685.000	100.000.000				124.961.600	99.308.200				99,42%	99,31%	-20,44%	99,37%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian					14.863.000.000					14.803.609.000					99,60%		99,60%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian		377.323.000	278.398.000	381.226.000	139.755.000		372.244.150	276.233.941	379.089.000	131.486.954		98,65%	99,22%	99,44%	94,08%	-17,54%	97,85%
Pengembangan Agribisnis Sistem Cooperative Farming		29.798.500					29.218.500					98,05%					98,05%
Gelar Produk Aneka Pangan Olahan		60.009.000	44.302.700	60.699.000	68.294.000		58.780.000	44.270.700	59.523.000	67.449.864		97,95%	99,93%	98,06%	98,76%	7,78%	98,68%
Pameran Potensi Produk Pertanian		130.672.500	115.660.000	285.640.000	55.583.700		125.674.500	115.623.400	247.745.000	55.270.000		96,18%	99,97%	86,73%	99,44%	18,31%	95,58%
Prima Tani Sumenep		25.000.000					24.666.500					98,67%					98,67%
Penanganan Pasca Panen Jagung Sistem Resi Gudang		25.000.000	59.998.500	53.250.000	52.630.000		24.898.500	59.456.250	52.575.000	50.786.000		99,59%	99,10%	98,73%	96,50%	42,53%	98,48%
Bimbingan Pengoperasian dan Penanganan Alat Pasca Panen Secara Berkala		42.802.000					41.512.000					96,99%					96,99%
Pengembangan Kawasan Agropolitan		94.532.500	29.941.000	23.850.000	23.850.000		93.402.200	27.772.500	23.735.000	23.170.000		98,80%	92,76%	99,52%	97,15%	-29,56%	97,06%
Revitalisasi Statistik Pertanian		75.000.000	55.875.000				71.169.000	55.873.200				94,89%	100,00%			-125,50%	97,44%
Analisis Usahatani dan Pasar Hasil Pertanian				15.000.000	15.000.000				14.350.000	14.900.000				95,67%	99,33%	0,00%	97,50%
Pelatihan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian		160.000.000					129.890.800					81,18%					81,18%

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 - 2021
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana	
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi
			Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Prosentase kelompok tani yang menjadi kelompok pengolah	2.675.000.000	2%	3.175.000.000	2%	3.650.000.000	2%	Kabid Pengolahan dan Pemasaran	
1	Penanganan Pemasaran Produk Pertanian/ Perkebunan									
1.1	Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Untuk Pemasaran Produk Pertanian/ Perkebunan	Jumlah petani pelaku usaha yang menggunakan aplikasi pemasaran online	500.000.000	20 klp	650.000.000	25 klp	750.000.000	30 klp		Kasi Pemasaran
1.2	Pameran Potensi Produk Pertanian/Perkebunan	Jumlah promosi produk pertanian yang dilaksanakan	325.000.000	3 kali	425.000.000	3 kali	550.000.000	3 kali		Kasi Pemasaran
2	Kemitraan dan Temu Usaha Produk Pertanian/Perkebunan									
2.1	Kemitraan Usaha Tani Komoditi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok yang melaksanakan kemitraan usaha	500.000.000	20 klp	600.000.000	20 klp	700.000.000	20 klp		Kasi Bimbingan Usaha
2.2	Temu Usaha Tani Komoditi Pertanian/Perkebunan	Jumlah temu usaha tani yang dilaksanakan	150.000.000	5 kali	250.000.000	7 kali	350.000.000	9 kali		Kasi Bimbingan Usaha
2.3	Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Jumlah penyediaan bantuan alat pengolahan hasil pertanian/perkebunan	1.000.000.000	20 pkt	1.000.000.000	20 pkt	1.000.000.000	20 pkt		Kasi Bimbingan Usaha
3	Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah alat pengolahan hasil yang disediakan	200.000.000	10 pkt	250.000.000	10 pkt	300.000.000	12 pkt		Kasi Pengolahan
B	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Jumlah kelompok wirausaha yang dibina	1.400.000.000	20 klp	1.400.000.000	20 klp	1.400.000.000	20 klp	Kabid Pengolahan dan Pemasaran	
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah kelompok/tenaga kerja terampil yang diberikan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil	400.000.000	20 klp	400.000.000	20 klp	400.000.000	20 klp		Kasi Bimbingan Usaha

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana	
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi
			Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Jumlah bantuan sarana produksi, bibit/benih yang disediakan	1.000.000.000	20 pkt	1.000.000.000	20 pkt	1.000.000.000	20 pkt		Kasi Bimbingan Usaha
C	Program Produksi Pertanian		1.192.500.000		1.350.750.000		1.457.575.000		Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		1. Jumlah Produksi Padi (ton)		232.170,12		237.525,12		241.088,00		
		2. Jumlah Produksi Jagung (ton)		440.157,90		450.684,29		457.444,55		
		3. Jumlah Produksi Kedelai (ton)		7.714,56		7.891,95		8.010,33		
		4. Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton)		52.283,14		54.897,30		57.642,16		
		5. Jumlah Produksi Bawang Merah (kw)		5.147,00		5.157,29		5.193,46		
		6. Jumlah Produksi Cabe Rawit (kw)		3.488,54		3.495,52		3.520,03		
1	Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah luas tanam demplot tanaman pangan yang dilaksanakan	210.000.000	10 ha	250.000.000	10 ha	300.000.000	10 ha		Kasi Produksi Tanaman Pangan
2	Budidaya Pertanian Pada Lahan Kering	Jumlah luas tanam demplot pertanian pada lahan kering yang dilaksanakan	210.000.000	10 ha	231.000.000	10 ha	233.100.000	10 ha		Kasi Produksi Tanaman Pangan
3	Budidaya Tanaman Hortikultura	Jumlah luas tanam demplot tanaman hortikultura yang dilaksanakan	300.000.000	6 ha	350.000.000	6 ha	400.000.000	6 ha		Kasi Produksi Hortikultura
4	Pembibitan/Perbenihan Tanaman	Jumlah kelompok yang memproduksi benih bersertifikat	157.500.000	10 klp	173.250.000	11 klp	174.825.000	12 klp		Kasi Perbenihan dan Perlindungan TPH
5	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman	315.000.000	20 kali	346.500.000	20 kali	349.650.000	20 kali		Kasi Perbenihan dan Perlindungan TPH
D	Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana pertanian dengan kebutuhannya	33.800.000.000	10%	37.980.000.000	20%	38.145.000.000	30%	Kabid Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	
1	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah penyediaan perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian	650.000.000	52 pkt	650.000.000	52 pkt	650.000.000	52 pkt		Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Tabel 1.2 - 4

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana		
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi	
			Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan LP2B	480.000.000	1 kec	500.000.000	1 kec	520.000.000	1 kec			Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air	Jumlah pembangunan/rehab infrastruktur pertanian yang dilaksanakan	5.400.000.000	10 unit	5.450.000.000	10 unit	5.500.000.000	10 unit			Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
4	Pengawasan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi/ Pesticida	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi/pestisida	470.000.000	100%	480.000.000	100%	500.000.000	100%			Kasi Pupuk, Pesticida dan Alsintan
5	Pengadaan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	6.400.000.000	20 unit	10.450.000.000	20 unit	10.500.000.000	30 unit			Kasi Pupuk, Pesticida dan Alsintan
7	Penyediaan informasi teknologi dalam sistem penyuluhan pertanian	Jumlah penyediaan informasi dalam sistem penyuluhan pertanian	400.000.000	27 Kec.	450.000.000	27 Kec.	475.000.000	27 Kec.			Kasi Penyuluhan
8	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistem Pertanian Terpadu Di Daerah Dataran Tinggi (IDB)	Jumlah luasan terkelola dengan penyediaan sarana dan prasarana terpadu yang dilaksanakan	10.000.000.000	200 ha	10.000.000.000	200 ha	10.000.000.000	200 ha			Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	10.000.000.000	60 unit	10.000.000.000	60 unit	10.000.000.000	60 unit			Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
E	Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)		7.560.000.000		8.855.000.000		9.900.000.000				
		1. Jumlah penyediaan bahan baku (tembakau) berkualitas		75.000.000 btg		75.000.000 btg		75.000.000 btg			Kabid Perkebunan
1	Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practices Tembakau	Jumlah pembudidayaan bibit tembakau nikotin rendah yang dilaksanakan	1.000.000.000	5 ha	1.250.000.000	5 ha	1.250.000.000	5 ha			Kasi Produksi Tanaman Tahunan
2	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah penumbuhan/ penguatan kelembagaan yang dilaksanakan	300.000.000	10 klp	325.000.000	10 klp	350.000.000	10 klp			Kasi Produksi Tanaman Tahunan
3	Penerapan Inovasi Teknis	Jumlah luas demplot penangkaran benih tembakau varietas unggul	360.000.000	3 ha	380.000.000	3 ha	400.000.000	3 ha			Kasi Produksi Tanaman Semusim
4	Penanganan Panen dan Pasca Panen	Jumlah sarana dan prasarana panen dan pasca panen yang disediakan	1.900.000.000	48 unit	1.900.000.000	48 unit	1.900.000.000	48 unit			Kasi Produksi Tanaman Semusim

Tabel 1.2 - 5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana		
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi	
			Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas bahan baku		17 unit		20 unit		30 unit		Kabid Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	
5	Dukungan Sarana Dan Prasarana Usaha Tani Tembakau	Jumlah sarana dan prasarana usaha tani tembakau yang disediakan	4.000.000.000	17 unit	5.000.000.000	20 unit	6.000.000.000	30 unit		Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	
F	Program Produksi Perkebunan		1.000.000.000		1.090.000.000		1.200.000.000		Kabid Perkebunan		
		1. Jumlah produksi Kelapa (ton)		42.241,18		42.663,92		42.663,92			
		2. Jumlah produksi Cabe Jamu (ton)		9.865,28		9.868,31		9.868,31			
		3. Jumlah produksi Jambu Mete (ton)		4.822,48		4.822,31		4.822,31			
		4. Jumlah produksi Siwalan (ton)		776,37		776,37		776,37			
		5. Jumlah produksi Tembakau (ton)		8.838,75		9.242,28		9.242,28			
1	Intensifikasi Tanaman Perkebunan Tahunan	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan tahunan yang dilaksanakan	400.000.000	10 ha	450.000.000	10 ha	500.000.000	10 ha		Kasi Produksi Tanaman Tahunan	
2	Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah tanaman perkebunan yang diremajakan/tertangani	300.000.000	500 btg	320.000.000	500 btg	350.000.000	500 btg		Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	Intensifikasi Tanaman Perkebunan Semusim	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan semusim yang dilaksanakan	300.000.000	10 ha	320.000.000	10 ha	350.000.000	10 ha		Kasi Produksi Tanaman Semusim	

Tabel 1.2 - 6

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 - 2021
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana	
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi
			Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	1.900.000.000	100%	2.152.000.000	100%	2.419.000.000	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	10.000.000	2500 srt	12.000.000	2600 srt	14.000.000	2700 srt		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	225.000.000	17 rekening	250.000.000	17 rekening	275.000.000	17 rekening		
3	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	125.000.000	6 jenis	150.000.000	6 jenis	175.000.000	6 jenis		
4	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan	80.000.000	26 jenis	90.000.000	26 jenis	95.000.000	26 jenis		
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50.000.000	5 jenis	60.000.000	5 jenis	70.000.000	5 jenis		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	100.000.000	8 jenis	125.000.000	8 jenis	150.000.000	8 jenis		
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	65.000.000	12 unit	70.000.000	12 unit	75.000.000	12 unit		
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas untuk rapat, koordinasi dan konsultasi yang disediakan	270.000.000	100 kali	310.000.000	110 kali	350.000.000	120 kali		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana		
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi	
			Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Peringatan Hari-Hari Besar										
9.1	Pelaksanaan Kegiatan/Pagelaran Memperingati Hari-Hari Besar	Jumlah Kegiatan/Pagelaran Memperingati Hari-Hari Besar yang dilaksanakan	100.000.000	4 kali	125.000.000	4 kali	150.000.000	4 kali			
9.2	Pelaksanaan Kegiatan/Pagelaran Kedaerahan	Jumlah Kegiatan/Pagelaran Kedaerahan yang dilaksanakan	100.000.000	4 kali	125.000.000	4 kali	150.000.000	4 kali			
10	Operasional UPTD	Jumlah bahan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD yang disediakan	65.000.000	2 UPT	75.000.000	2 UPT	85.000.000	2 UPT			
11	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah jasa layanan perkantoran yang disediakan	155.000.000	12 pkt	175.000.000	12 pkt	200.000.000	12 pkt			
12	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit			
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang dilaksanakan	50.000.000	2 unit	60.000.000	3 unit	60.000.000	3 unit			
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	50.000.000	6 unit	55.000.000	6 unit	60.000.000	6 unit			
15	Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang direhab	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit			
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	50.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit			
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	75.000.000	40 unit	75.000.000	40 unit	100.000.000	40 unit			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu dan Indikator Program						Pelaksana	
			2019		2020		2021		Bidang	Kasi
			Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	30.000.000	10 jenis	35.000.000	10 jenis	40.000.000	10 jenis		
B.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pengembangan kompetensi pegawai	95.000.000	100%	175.000.000	100%	180.000.000	100%		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/ bimtek	20.000.000	2 org	25.000.000	2 org	30.000.000	2 org		
2	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian yang dilaksanakan	75.000.000	127 set	150.000.000	127 set	150.000.000	127 set		
C.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	105.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%		
1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	45.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.1	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun	30.000.000	4 dokumen	32.500.000	4 dokumen	32.500.000	4 dokumen		
2.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	30.000.000	4 dokumen	32.500.000	4 dokumen	32.500.000	4 dokumen		